

**PERAN GERAKAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN
MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA
(Studi terhadap Organisasi KAMMI Daerah Yogyakarta)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)**

Oleh

**HIMA KURNIA
NIM. 04541574**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hima Kurnia
NIM : 04541574
Fakultas : Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Sosiologi Agama
Alamat : Watu Gajah, Rt 09/Rw 03 Kramat, Kec. Bungah Kab.
Gresik Jawa Timur
Telp/Hp : 081 227 278 300
Alamat jogja : "Wisma Indonesia" Sapen, Gk1/401 Yogyakarta
Judul skripsi : Peran Gerakan Mahasiswa Dalam Mewujudkan
Masyarakat Madani Di Indonesia (Studi Terhadap
Organisasi KAMMI Daerah Yogyakarta)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali
3. apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan asli karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 19 Januari 2009

Saya Yang menyatakan,



Hima Kurnia
NIM : 04541574



FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Ustadi Hamzah, S.Ag.,M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Hima Kurnia
Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hima Kurnia
NIM : 04541574
Jurusan : Sosiologi Agama (SA)
Judul Skripsi : PERAN GERAKAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA (STUDI TERHADAP ORGANISASI KAMMI DAERAH YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/ Program Studi Sosiologi Agama (SA) pada Fakultas Ushuluddin UIN sunan kalijaga yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2009

Pembimbing

Ustadi Hamzah, S.Ag.,M.Ag
NIP. 150298987



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/0168/2009

Skripsi dengan judul: **PERAN GERAKAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA (Studi Terhadap Organisasi KAMMI Daerah Yogyakarta)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Hima Kurnia
NIM : 04541574
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 28 Januari 2009
Nilai Munaqasyah : 90,66 (A-)
Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

**Tim Munaqasyah:
Panitia Ujian Munaqasyah:**

Ketua Sidang

Ustadhi Hamsah, S.Ag., M.Ag
NIP: 150298987

Penguji I

Drs. Moh. Damami, M.Ag.
NIP: 150202822

Penguji II

Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si, Psi
NIP: 150301493

Yogyakarta, 28 Januari 2009

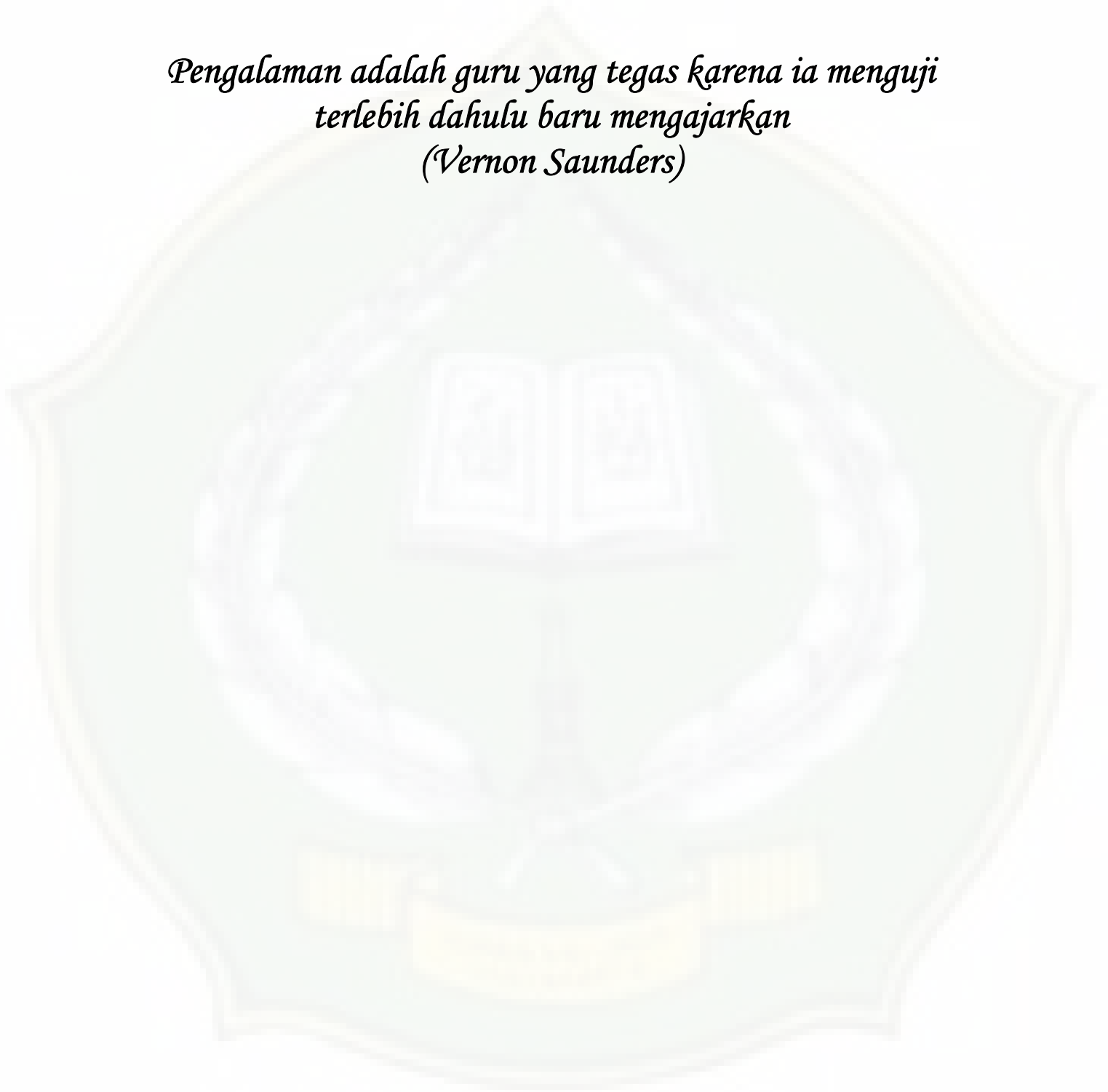
DEKAN



Dr. Ayu Aryani, M.Ag
NIP: 150 232 692

MOTTO

*Pengalaman adalah guru yang tegas karena ia menguji
terlebih dahulu baru mengajarkan
(Vernon Saunders)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk:

- Ayahanda (moh. thohir) dan Ibunda (shofiyah) tercinta atas doa, cinta serta motivasi tiada henti
- Saudara-saudara ku tercinta mbak luluk dan wildan yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi
- Almamater ku Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

ABSTRAK

Gerakan mahasiswa diakui atau tidak, telah turut serta dalam proses perubahan di negeri ini. Gerakan yang semata-mata muncul karena komitmen moral dan panggilan nurani untuk berpihak kepada rakyat ini menjadi kekuatan oposisi yang paling efektif karena tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu yang merusak perjuangan mereka. Salah satu elemen gerakan mahasiswa yang turut serta dan mempunyai andil yang cukup besar dalam proses perubahan adalah gerakan mahasiswa Islam, karena mereka mempunyai basis masa yang jelas. Keberadaan gerakan mahasiswa seharusnya juga berperan dalam penguatan masyarakat madani yang dicita-citakan di Indonesia

Untuk mengkaji lebih mendalam tentang gerakan mahasiswa, maka diambil salah satu elemen gerakan mahasiswa Islam sebagai obyek studi dalam penelitian ini yaitu organisasi KAMMI yang ada di wilayah Yogyakarta. Rumusan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama* terkait dengan konstruksi intelektual yang meliputi doktrin serta ideologi yang menjadi landasan gerak para aktivisnya. *Kedua* mengenai peran-peran sosial yang dimainkan diwilayah eksternal organisasi serta relevansinya dengan pembentukan masyarakat madani di Indonesia yang juga dicita-citakan oleh organisasi ini pada awal berdirinya.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan para pengurus serta kader KAMMI Daerah Yogyakarta, penelusuran melalui dokumen serta observasi. Teori yang digunakan sebagai bahan analisis di sini adalah teori gerakan sosial dengan pendekatan perilaku kolektif yang dikembangkan oleh John McCarthy dan Mayer Zald, keduanya memberi perhatian terbesar pada bagaimana keyakinan atau ideologi ditransformasikan dalam tindakan nyata, selain itu konsep masyarakat madani juga digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat sejauh mana peran sosial yang dimainkan organisasi KAMMI serta relevansinya dengan cita-cita mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

Dari hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa konstruksi intelektual para aktivis organisasi ini adalah Islam yang menyeluruh (*kaffah*) yakni Islam diyakini mampu menyelesaikan dan memberi solusi atas berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya sehingga cenderung tertutup atas ide-ide serta pemikiran di luar konsep keislaman. Keyakinan terhadap doktrin keislaman yang mengakar kuat dalam diri setiap individu sebagai kader diterjemahkan melalui pola gerak, pola sikap dan pola perilaku serta respons terhadap berbagai persoalan yang terjadi di sekitarnya. Dari doktrin dan konstruksi intelektual tersebut kemudian ditransformasikan dalam tindakan konkret melalui peran di wilayah publik dan sosial kemasyarakatan, namun demikian peran-peran yang dimainkan diwilayah sosial masyarakat secara garis besar berupa kegiatan yang lebih berorientasi pada penguatan aspek religius masyarakat seperti Baksos (bakti sosial) yang dilakukan pada hari-hari besar Islam, Pengajian dan lain sebagainya sehingga belum menjadi daya dukung untuk mewujudkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu prasyarat penting untuk menciptakan masyarakat madani.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan anugerah terbesar berupa akal yang dengannya kita mampu melihat, membaca, berkata serta berfikir sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kemampuan yang penulis miliki yang tentu saja merupakan anugerah terindah dari Allah SWT. Tak lupa pula Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya, serta semoga terlimpah pula atas kita semua sebagai pengikut jalannya.

Selesainya tugas akhir ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penulis berharap karya ilmiah yang sederhana ini mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Sosiologi Agama

keseluruhan proses penyusunan skripsi ini merupakan hasil kerja keras yang diiringi dengan Doa dan usaha penulis serta bantuan dan kerjasama pihak-pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dari proses awal hingga akhir, oleh karenanya rasa hormat dan ungkapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. M. Soehadha, S.Sos, M. Hum selaku ketua Program Studi Sosiologi Agama yang telah banyak membantu penulis dalam proses ini dari awal, juga atas motivasi dan dukungannya agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini. Dan kepada Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama Ibu Nurus Sa'adah, S.Psi, M.Si Psi, atas segala support dan motivasinya serta telah memberikan pembimbing yang baik bagi penulis.
4. Dra. Hj. Nafilah Abdullah M.Ag, selaku penasehat akademik, penulis haturkan terimakasih atas bantuan, motivasi serta bimbingannya selama ini.
5. Ustadi Hamzah S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing penulis, "Terimakasih atas kesabaran dan ketelatenannya, serta segala saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini sehingga kebingungan-kebingungan penulis berangsur-angsur berubah menjadi keyakinan".
6. kepada seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin, terimakasih atas segala Doa, Motivasi serta Ilmu yang bapak ibu berikan selama masa studi, sehingga mengantarkan penulis pada penulisan skripsi ini.
7. kepada seluruh jajaran TU dan karyawan Fakultas Ushuluddin, "terimakasih atas segala jasa yang telah bapak ibu berikan dengan sepenuh hati sehingga penulis mampu menyelesaikan urusan-urusan administrasi"
8. kepada Ayahanda (Moh. Thohir) dan Ibunda (Shofiyah) tercinta penulis haturkan lautan terimakasih atas doa, cinta serta motivasi yang tiada henti kepada penulis, serta atas pelajaran hidup yang sangat berharga yang

penulis dapatkan dari beliau berdua, sehingga membuka cakrawala kesadaran penulis akan pentingnya perjuangan dan kerja keras.

9. kepada segenap keluarga yang tiada hentinya memotivasi penulis, untuk mbak luluk, mas kamil, cakDan, zazax, pang didi dan tak lupa untuk keponakan tercinta ratih yang selalu menghibur penulis dikala kejenuhan mulai datang. Serta semua keluarga yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Kawan-kawan HMI Komisariat Ushuluddin, HMI Korkom UIN, HMI Cabang Yogyakarta serta kawan-kawan KOHATI tempat penulis berproses menjadi lebih dewasa dan mengerti arti kebersamaan persahabatan serta perjuangan. "Terimakasih untuk kebersamaan dalam duka dan bahagia sehingga penulis bangga pernah berproses bersama kalian"
11. Teman-teman LKM Fakultas Ushuluddin, BEM-PS SA, UKM Inkai, teman-teman KKN "gempa", serta seluruh teman-teman Sosiologi Agama, terutama angkatan 04, dan Tim PKL Gunung Kemukus yang telah memberikan satu pesan bahwa kebersamaan itu indah untuk dikenang. Dan untuk teman-teman ICBC, tempat penulis mendapatkan pengalaman berharga tentang profesionalitas dan persaudaraan terimakasih atas kebersamaan, serta motivasinya selama ini.
12. Teman-teman di "wisma Indonesia", "wisma Rambu" serta "kos munggur" tempat penulis pernah bersinggah, Terimakasih untuk kebersamaan yang penuh canda....., tanpa kalian hari-hari ku kurang bervariasi.

13. teman serta sahabat yang nun jauh disana, untuk mbak yung, mbak alvi, Uus, Needa dan kak saragih, terimakasih atas motivasinya selama ini "ternyata persahabatan tak kenal jarak ya...."

14. kepada segenap pengurus KAMMI Daerah Yogyakarta beserta jajarannya dan kader-kader KAMMI selaku informan riset yang dengan senang hati membantu penulis mendapatkan data-data serta dokumen yang dibutuhkan demi terselesaikannya skripsi ini

15. Terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT, terakhir kali, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik, saran serta masukan yang membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 09 Januari 2008

Penulis,

Hima Kurnia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Informan
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: Deklarasi Malang
Lampiran IV	: Struktur Pengurus KAMMI DIY
Lampiran V	: Data Pengurus KAMMI DIY Periode 2008-2010
Lampiran VI	: GBHO KAMMI Pusat
Lampiran VII	: GBHK KAMMI D.I.Y
Lampiran VIII	: Surat Perintah Tugas Riset
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian
Lampiran X	: Surat Izin Dari Bappeda D.I.Y
Lampiran XI	: Surat Izin Dari Bappeda Sleman
Lampiran XII	: Surat Keterangan Dari Pengurus KAMDA Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teoritis.....	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II SETTING INTELEKTUAL ORGANISASI KAMMI	
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI KAMMI	25
1. Sejarah Lahirnya Organisasi KAMMI.....	25
2. Visi dan Misi Organisasi KAMMI.	34
3. Struktur Organisasi KAMMI	38
B. KONSTRUKSI INTELEKTUAL ORGANISASI KAMMI ..	42
1. Ideologi dan Prinsip Gerakan KAMMI.	42
2. Melacak Akar Intelektual Organisasi KAMMI.	50

BAB III	GERAKAN MAHASISWA DAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA	
	A. Masyarakat Madani, Konsep dan Relevansinya di Indonesia.	62
	B. Signifikansi Gerakan Mahasiswa Terhadap Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia.	73
BAB IV	PERAN KAMMI DALAM PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA	
	A. Dinamika Isu Gerakan dan Peran Sosial Organisasi KAMMI Daerah Yogyakarta.....	85
	B. Tipologi Gerakan KAMMI Daerah Yogyakarta.	93
	C. Signifikansi Peran Gerakan KAMMI dalam Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia.....	99
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran	107
	DAFTAR PUSTAKA	108
	LAMPIRAN	
	CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan mahasiswa sebagai representasi perwujudan penegakan demokrasi di negeri ini telah mengalami pasang surut sejarah yang sangat panjang, diawali dengan lahirnya Boedi Utomo pada era 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Indonesia 1945, Soekarno 1966, Peristiwa Malari 1975, Asas Tunggal 1978, Reformasi 1998.¹ Sampai sekarang pasca gerakan Reformasi. Meskipun gerakannya dinilai mengalami disorientasi.

Terhitung sejak era 1990-an gerakan mahasiswa sebenarnya telah merebut ruang politik ditengah tekanan terhadap mahasiswa. Radikalisasi lahir justeru disebabkan upaya kekuasaan untuk mengalienasi mahasiswa dengan rakyat melalui lembaga-lembaga korporasi tersebut. Pada waktu itu manifestasi gerakanpun lebih nyata lewat kolaborasi langsung dengan rakyat, tatkala parlemen semakin tidak berdaya dan lumpuh, sementara kekuasaan negara begitu jumawa diatas takhta tanpa dukungan dan legitimasi rakyat.²

Dalam memainkan peranannya, gerakan mahasiswa didorong oleh panggilan nurani dan keberpihakan atas dasar ideologi terhadap masyarakat serta agar dapat berbuat lebih banyak bagi perbaikan kualitas hidup bangsanya. Berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh gerakan

¹ Maulana Jannah, *Menggeser Paradigma Gerakan Mahasiswa*. <http://66.218.69.11/search/cache?ei=UTF-KAMMI.or.id>. Diakses tgl 18 Mei 2008

² Arie Sudjito, Dkk, *Di Tikungan Reformasi Mahasiswa Kebingungan*, BASIS, Nomor 07-08, tahun ke 47, edisi Juli- Agustus 1998, Hlm. 54

mahasiswa merupakan usaha melakukan koreksi atau kontrol atas sikap dan kebijakan politik penguasa yang dirasakan telah mengalami banyak distorsi yang merugikan masyarakat. Maka sejarah perubahan bangsa di dunia merupakan sejarah yang kebanyakan ditorehkan oleh mahasiswa untuk kepentingan bangsanya.³

Sebagai kaum intelektual mahasiswa berpeluang dalam posisi terdepan dalam proses perubahan sosial mahasiswa kini dan sampai kapanpun akan diterima masyarakat sebagai warga kelompok pembaharu kehidupan masyarakat, itu sebabnya gerakan mahasiswa dipandang sebagai gerakan moral⁴. Meskipun demikian banyak terjadi perdebatan mengenai gerakan mahasiswa apakah tergolong sebagai gerakan moral atau politik an sich.

Ada beberapa pertentangan pendapat dalam hal ini, pihak yang mengatakan gerakan mahasiswa sebagai *social movement* (gerakan sosial) dikarenakan karakter gerakannya yang tidak ingin langsung merebut kekuasaan atau menjadi agen perubahan dari sebuah kekuatan politik tertentu dalam negara untuk merebut kuasa, melainkan menekankan pada persoalan moralitas dengan isu-isu populis yang dapat menyatukan berbagai kepentingan seluruh komponen masyarakat sehingga dapat memperoleh dukungan yang sangat luas, bagi gerakan mahasiswa tersebut.⁵

⁴ Maulana Jannah, *Menggeser Paradigma Gerakan Mahasiswa.*, Diakses tgl 18 Mei 2008

⁵ Edy Suprianto, *Gerakan Mahasiswa Dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia ; Studi Terhadap Peranan HMI-MPO Cab. Yogyakarta Tahun 1998-2004.* Skripsi (tidak dipublikasikan) UIN Sunan Kalijaga Fak. Ushuluddin. Hlm. 18

⁵ Pradipa Yoedhanegara, *Desentralisasi Gerakan Mahasiswa*, (Jakarta: DPP Aliansi Wartawan Indonesia), Cet.1. 2005, Hlm. 22

Sedangkan gerakan sosial dipahami sebagai sebuah fenomena positif, atau sebagai sarana konstruktif bagi perubahan sosial. Pemahaman ini didasarkan pada teori konflik, dengan asumsi dasar; pertama, rakyat dianggap memiliki sejumlah kepentingan dasar dimana mereka akan berusaha secara keras untuk memenuhinya. Kedua, kekuasaan adalah inti dari struktur sosial dan ini melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya. Ketiga, nilai dan gagasan adalah senjata yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, ketimbang sebagai alat untuk mempertahankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat.⁶

Dengan demikian gerakan mahasiswa ketika mengusung nilai perjuangan untuk membebaskan rakyat dari belenggu penindasan dan menciptakan perubahan sosial maka gerakan mahasiswa bisa dikatakan sebagai gerakan moral atau gerakan sosial, akan tetapi ketika mahasiswa telah serta merta dalam kelompok kepentingan tertentu maka gerakan tersebut bukan lagi didasarkan pada moral melainkan karena kepentingan politik semata. Meskipun tidak bisa dipungkiri gerakan mahasiswa merupakan perwujudan resistensi atas kondisi politik yang represif.

Dalam panggung politik, menurut Rajab dalam Supriyanto (1999), mahasiswa pernah disebut sebagai satu-satunya oposisi yang efektif (*the only effective opposition*). Namun demikian kebijakan orde baru dengan NKK-nya berhasil menghegemoni gerakan mahasiswa. Birokrat kampus menjadi kaki tangan pemerintah yang turut serta secara aktif melakukan tekanan-tekanan

⁶ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan*, (Bandung: Teraju.) 2003, hlm. 24

kepada mahasiswa. Hal ini mengakibatkan mahasiswa kehilangan moralitasnya untuk tampil dalam aktivitas politik sebagai oposisi. Malahan angin stabilisasi yang ditiupkan orde baru juga berhasil mendoktrinkan sistem nilai baru pada mahasiswa. Mahasiswa hanyut pada arus mengejar kenikmatan dan kemajuan diri semata alias menjadi *children of pragmatism*⁷

Keberadaan gerakan mahasiswa dalam konstelasi sosial politik di negeri ini tak bisa dipandang sebelah mata. Diakui atau tidak, keberadaan mereka menjadi salah satu kekuatan yang selalu dipertimbangkan oleh berbagai kelompok kepentingan (*interest group*) terutama pengambil kebijakan, yakni negara. Diantara elemen-elemen gerakan mahasiswa yang memiliki pengaruh signifikan adalah gerakan mahasiswa Islam. Mereka adalah organisasi massa (Ormas) mahasiswa yang memiliki basis konstituen yang jelas dan massa pendukung yang besar seperti Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Dipo, HMI-MPO, Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).⁸

Berangkat dari persoalan diatas penulis ingin mengadakan penelitian yang akan diproyeksikan pada salah satu organisasi mahasiswa Islam yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dengan memfokuskan pada peran organisasi KAMMI dalam mewujudkan Masyarakat Madani yang memang menjadi tujuan dari organisasi ini, dalam artian

⁷ Andi Rahmat dan Muhammad Najib, *Selamat Datang Musa-Musa Baru*,(Kata pengantar untuk buku: *Gerakan perlawanan dari masjid kampus*) Yogyakarta: Profetika. 2007

⁸ Imam Cahyono. *Melacak Akar Ideologi Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia*. www.geocities.com/jurnal_iitindonesia/gerakan_mhs_Islam.htm, diakses 15 Desember pkl 21.00

bagaimana strategi dan upaya gerakan yang dilakukan KAMMI dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dan penelitian kali ini akan difokuskan pada salah satu daerah saja yakni KAMMI Daerah Yogyakarta, ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui dinamika gerakan sosial mahasiswa ditingkatan lokal. Alasan memilih obyek penelitian ini antara lain:

KAMMI sebagai organisasi mahasiswa Islam yang baru lahir pada tahun 1998 (masa reformasi), memiliki karakter gerakan yang khas, kemunculannya sebagai gerakan mahasiswa berbasis religius yang berasal dari para aktivis masjid kampus merupakan sesuatu yang secara sosio historis memiliki mata rantai dengan upaya revitalisasi gerakan mahasiswa pasca NKK/BKK, selain itu semangat perubahan revolusioner yang diajukan ditengah krisis nasional dan tuntutan solusi menyeluruh di segala bidang justru lahir ketika berbagai elemen gerakan mahasiswa Islam yang lahir jauh sebelumnya mengalami stagnasi atau bahkan terkooptasi oleh agenda rezim⁹

Adanya konsistensi aksi dalam mengkritisi rezim sepanjang masa transisi (dari orde baru ke orde reformasi), memposisikan KAMMI pada garis moderat-kritis. Dan walaupun masuk kategori sebagai gerakan yang bersifat ideologis (Islam) namun KAMMI mampu membangun aliansi dengan berbagai elemen gerakan lain yang berbeda secara ideologi¹⁰

KAMMI terbentuk dalam rangkaian acara FS LDK (Forum Silaturahmi Lembaga Da'wah Kampus) Nasional X di Universitas

⁹ Mahfudz Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi: Kiprah Politik Aktivis Dakwah Kampus Dalam Perjuangan Demokrasi Ditengah Gelombang Krisis Nasional Multi Dimensi*, (Solo : ERA INTERMEDIA), 2003, Hlm. 29

¹⁰ Mahfudz Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi.*, Hlm. 30

Muhammadiyah Malang tanggal 25-29 Maret 1998. Setidaknya ada dua alasan terbentuknya KAMMI pertama, sebagai ekspresi keprihatian mendalam dan tanggung jawab moral atas krisis dan penderitaan rakyat yang melanda Indonesia serta itikad baik untuk berperan aktif dalam proses perubahan. Kedua, untuk membangun kekuatan yang dapat berfungsi sebagai peace power untuk melakukan tekanan moral kepada pemerintah.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil beberapa fokus penelitian yang dijadikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi intelektual organisasi KAMMI ?
2. Bagaimana peran sosial organisasi KAMMI Daerah Yogyakarta dalam pembentukan masyarakat madani di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana konstruksi intelektual gerakan KAMMI sebagai representasi gerakan tarbiyah yang berbasis di kampus
2. Mengetahui bagaimana peran sosial organisasi KAMMI terutama daerah Yogyakarta dalam pembentukan masyarakat madani di Indonesia

¹¹ Imam Cahyono. *Melacak Akar Ideologi Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia*. www.geocities.com/jurnal_iitindonesia/gerakan_mhs_Islam.htm, diakses 15 Desember pkl 21.00

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. memperkaya wacana sosiologi agama terkait tentang gerakan sosial dan gerakan mahasiswa yang berbasis Islam.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap wacana gerakan mahasiswa terutama gerakan mahasiswa Islam, dalam lingkup lokal (daerah) terkait dinamika isu serta konstruksi intelektual yang melandasi gerakannya.

D. Telaah Pustaka

Wacana tentang gerakan mahasiswa telah banyak tertuang dalam buku-buku maupun jurnal serta tulisan-tulisan yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, apalagi pada masa reformasi dan pasca reformasi banyak sekali penelitian tentang gerakan mahasiswa mengingat gerakan mahasiswa yang menjadi pahlawan tumbangnya rezim orde baru Soeharto. Melalui penelusuran yang dilakukan oleh peneliti banyak sekali ditemui buku-buku yang berbicara mengenai gerakan mahasiswa. Namun disini peneliti akan membatasi buku yang akan dijadikan acuan pustaka dalam penulisan skripsi ini antara lain:

Buku karya Andi Rahmat dan Mukhamad Najib dengan judul *Gerakan Perlawanan Dari Masjid Kampus*¹² merupakan karya yang ditulis oleh pelaku sejarah sendiri sehingga buku ini mampu menggambarkan gerakan KAMMI secara utuh sebagai gerakan mahasiswa yang lahir pada masa reformasi dan proses terbentuknya dari forum silaturahmi lembaga dakwah kampus (FS –

¹² Andi Rahmat dan Muhammad Najib, *Gerakan perlawanan dari masjid kampus* Yogyakarta: Profetika. 2007

LDK), buku ini lebih banyak berbicara mengenai kondisi gerakan mahasiswa dan perjuangan KAMMI pada masa reformasi.

Literatur yang lain adalah skripsi mahasiswa Sosiologi Universitas Indonesia, Ali Said Damanik yang kemudian karyanya dipublikasikan dalam bentuk buku yang berjudul *Fenomena Partai Keadilan*¹³, buku ini lebih menyoroti pada transformasi gerakan tarbiyah menjadi partai politik, gerakan tarbiyah sendiri merupakan cikal bakal lahirnya organisasi KAMMI karena KAMMI memang dibentuk oleh aktivis dakwah kampus.

Sebuah buku dengan judul *KAMMI Dan Pergulatan Reformasi; Kiprah Politik Aktivis Dakwah Kampus Dalam Perjuangan Demokratisasi ditengah Gelombang Krisis Nasional Multi Dimensi*¹⁴, buku yang ditulis oleh Mahfudz Sidiq ini adalah sebuah tesis yang disusun untuk menamatkan studinya pada Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana KAMMI sebagai salah satu elemen gerakan mahasiswa yang turut meninggalkan tinta sejarah dalam menumbangkan rezim orde baru Soeharto serta peran perubahan yang dimainkannya pada era yang disebut transisi demokrasi selama kurun waktu tiga tahun pertama setelah kelahirannya (1998-2001).

Sebuah skripsi karya Edi Supriyanto Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Gerakan Mahasiswa Dalam Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia (Studi Atas Peranan HMI-MPO Cabang*

¹³ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan*, Bandung: Teraju. 2003

¹⁴ Mahfudz Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi: Kiprah Politik Aktivis Dakwah Kampus Dalam Perjuangan Demokrasi Ditengah Gelombang Krisis Nasional Multi Dimensi*, (Solo : ERA INTERMEDIA), 2003

Yogyakarta Tahun 1998-2004.¹⁵ dalam skripsi ini diuraikan bagaimana dinamika gerakan mahasiswa pada rentangan tahun 1998-2004 dan pergulatannya dalam memperjuangkan tegaknya demokrasi di Indonesia dan penelitian ini difokuskan pada HMI-MPO Cabang Yogyakarta.

Meskipun banyak penelitian tentang gerakan mahasiswa khususnya yang berbicara mengenai organisasi KAMMI, tentu menggunakan fokus penelitian yang berbeda-beda, skripsi yang akan peneliti susun ini merupakan penelitian lapangan yang lebih memfokuskan pada dinamika gerakan dan Peran sosial organisasi KAMMI terutama yang ada di propinsi DIY sebagai bagian dari gerakan sosial dan gerakan mahasiswa Islam yang mempunyai konstruksi intelektual yang berbeda dan mempengaruhi peran-peran sosial yang menjadi fokus garapan dan konsentrasi isu yang diperjuangkan serta relevansinya dalam upaya perwujudan masyarakat madani di Indonesia

E. Kerangka Teori

a. Gerakan Sosial

Untuk menganalisis penelitian yang akan dilakukan, tentunya dibutuhkan pemetaan yang jelas untuk membedah objek studi ini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologis yakni gerakan mahasiswa dilihat sebagai entitas sosial yang mengupayakan adanya perubahan.

¹⁵ Edi supriyanto, "Gerakan Mahasiswa Dalam Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia; Studi Atas Peranan Hmi-Mpo Cabang Yogyakarta Tahun 1998-2004", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

Salah satu aspek pembahasan penting dalam wacana demokratisasi adalah peran kekuatan-kekuatan oposisi yang ada ditengah masyarakat sipil, Huntington secara jelas menyebutkan peran intelektual perkotaan sebagai kekuatan oposisi yang paling penting.¹⁶ Mahasiswa merupakan salah satu elemen yang merepresentasikan sebagai kaum intelektual perkotaan. Dalam kasus Indonesia, jika kita menilik kembali sejarah Bangsa maka tidak akan terlepas dari peran gerakan mahasiswa didalamnya.

Gerakan mahasiswa dalam hal ini bisa dilihat sebagai entitas dari gerakan sosial (*social movement*) mengingat gerakan mahasiswa merupakan kelompok oposisi yang menginginkan adanya perubahan. Wacana gerakan sosial selalu diidentikkan dengan upaya menciptakan perubahan baik itu perubahan secara evolusioner maupun revolusioner. Gerakan juga identik dengan upaya resistensi (penentangan) atas kondisi yang menindas.

Secara jelas gerakan didefinisikan sebagai proses penyusunan kekuatan dari pihak-pihak yang menghendaki perubahan dan secara bertahap menggelar tindakan-tindakan nyata¹⁷. Adapun mengenai karakteristik gerakan bisa dipetakan dalam dua kategorisasi, antara lain:

- 1) gerakan sebagai suatu reaksi spontan; sebab-sebab yang tidak begitu jelas (tidak mempunyai rumusan yang jelas) menggunakan jaringan

¹⁶ Mahfudz Sidiq, *KAMMI Dan Pergulatan Reformasi*, hlm. 45

¹⁷ Timur Mahardika, *Gerakan Massa: Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai*, (Yogyakarta: LAPERA PUSTAKA UTAMA),2000, hlm. 12

informasi yang tidak tertata (bukan dikonstruksi secara sengaja); terhadap suatu keadaan tertentu.

- 2) Gerakan sebagai langkah-langkah terorganisir dengan tujuan, strategi dan cara-cara yang dirumuskan secara jelas, sadar dan didasarkan pada suatu analisa sosial yang kuat¹⁸

Dalam konteks gerakan mahasiswa karakteristik yang kedua lebih sesuai sebagai kategori gerakan mahasiswa, dengan alasan gerakan mahasiswa mempunyai organisasi yang jelas serta visi, misi perjuangan yang telah dirumuskan secara jelas pula, mengingat mahasiswa merupakan manusia terdidik yang merepresentasikan kaum intelektual, selanjutnya gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa ini disebut sebagai gerakan sosial¹⁹

Secara umum gerakan sosial memiliki arti yang sangat luas, Giddens (1993) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama; atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan²⁰

Senada dengan apa yang diungkapkan Giddens, Tarrow (1998) mendefinisikan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat

¹⁸ Timur Mahardika, *Gerakan Massa: Mengupayakan Demokrasi*, Hlm. 15-16

¹⁹ Gerakan mahasiswa disebut sebagai gerakan sosial karena karakter gerakannya yang tidak ingin langsung merebut kekuasaan melainkan mempermasalahkan persoalan moralitas dan isu –isu populis untuk membela kaum tertindas.

²⁰ Fadillah putra, Dkk (tim penulis), *Gerakan Sosial; Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*, (Malang : Placid's bekerjasama dengan Averroes Press), 2006, Hlm. 1

yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan dan hasilnya adalah gerakan sosial.²¹

Untuk melihat perdebatan konseptual mengenai gerakan sosial, beberapa kerangka teoritis akan dirujuk. Secara umum ada empat perspektif penting dalam mengisi perdebatan mengenai gerakan sosial. Yang pertama dan paling banyak dirujuk adalah perspektif "perilaku kolektif" (*collective behavior*); kedua "teori mobilisasi sumber" (*resource mobilisation theory*); ketiga "proses politik" (*political proses*); dan terakhir "pendekatan gerakan sosial baru" (*new social movement*)²².

Untuk menjelaskan gerakan sosial, teori gerakan sosial yang sesuai dengan objek penelitian ini adalah teori gerakan sosial dengan menggunakan pendekatan perilaku kolektif yang dikembangkan oleh John McCarthy dan Mayer Zald, keduanya memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada pentingnya faktor peran organisasi dalam gerakan sosial, yang disebut *resource mobilisation theory*²³

²¹ Fadillah putra, Dkk (tim penulis), *Gerakan Sosial; Konsep*, Hlm. 2

²² Daniel Hutagalung, "Laclau dan Mouffe Tentang Gerakan Sosial", dalam. *Majalah Basis*. Nomor 01-02, Tahun ke-55.edisi Januari-Februari 2006, Hlm. 40

²³ Daniel Hutagalung, "Laclau dan Mouffe Tentang", hlm. 42

Lebih jauh keduanya mendefinisikan gerakan sosial sebagai

A set of opinions and beliefs wich represents preference for changing some element of the social structure and/or reward distribution of society . a counter movement is a set of opinions and beliefs in a population opposed to a social movement

Perhatian terbesar mereka adalah pada kondisi dimana keyakinan-keyakinan ditransformasikan kepada tindakan-tindakan konkret ²⁴

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisa peran-peran sosial KAMMI (khususnya KAMMI Daerah Yogyakarta) sebagai sebuah perilaku kolektif dalam merespon kondisi sosial yang didasarkan pada konstruksi intelektual dan doktrin yang dibangun sehingga mempengaruhi perilaku politik serta peran sosial kemasyarakatan.

b. Masyarakat Madani

Konsep masyarakat madani disini menjadi penting sebagai tolak ukur dalam melihat peran-peran sosial yang dimainkan oleh organisasi KAMMI, (sebagai objek studi dalam penulisan skripsi ini) karena pada awal terbentuknya, visi utama dari organisasi ini adalah mewujudkan masyarakat madani di Indonesia yang merupakan antitesa dari kondisi bangsa Indonesia ketika berada dalam tekanan rezim otoriter orde baru.

Masyarakat madani mengacu pada konsep awal *civil society* yang pertama kali berkembang dari Barat. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Cicero, seorang orator dan pujangga Roma (106-43

²⁴ Daniel Hutagalung, "Laclau dan Mouffe Tentang, hlm. 42

SM) yang kemudian dikembangkan juga oleh para filsuf sesudahnya seperti John Locke (1632-1704), dan Rousseau (1712-1778).

Konsep masyarakat madani juga mulai dikenal di Indonesia dan menjadi diskursus pembahasan pada sekitar tahun 1990-an. Pertamakali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal 26 September 1995 di Jakarta, konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju²⁵

Kemudian konsep masyarakat madani banyak dipakai oleh para cendekiawan Indonesia seperti Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, M. Dawam Rahardjo, AS Hikam dan lain sebagainya, dan konsep masyarakat madani yang penulis pakai sebagai kerangka dalam menganalisa objek studi ini adalah konsep dari tiga tokoh yaitu Nurcholish Madjid, M Dawam Rahardjo (keduanya mewakili muslim modernis) dan AS Hikam (representasi pemikiran muslim tradisional)

Secara umum konsep masyarakat madani dari ketiga tokoh tersebut mempunyai perbedaan pandangan dalam kaitan hubungan antara masyarakat madani dengan negara. Para muslim modernis yang pada masa orde baru lebih dekat dengan kekuasaan terlihat lebih bersikap kompromis dan akomodatif dengan kekuasaan negara, sedangkan kelompok muslim tradisional yang lebih dekat dengan aras akar rumput mengkonsepsikan

²⁵ A. Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi Ham dan Masyarakat Madani* Jakarta : IAIN Jakarta. 2000, hlm. 140

civil society sebagai kekuatan yang mempunyai daya kontrol terhadap kekuasaan negara.

Nurcholish Madjid mengkonsepsikan masyarakat madani dengan mengacu pada kerangka pengalaman historis umat Islam yakni masyarakat madinah pada masa Rosulullah. Tak lama setelah menetap di Madinah nabi bersama semua unsur penduduk madinah secara konkret meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal dengan piagam madinah (*mitsaq al-madinah*). Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain kepada wawasan kebebasan terutama di bidang agama dan ekonomi serta tanggung jawab sosial dan politik khususnya pertahanan secara bersama.²⁶

Menurut Madjid, masyarakat madani warisan Nabi antara lain bercirikan egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan bukan berdasarkan keturunan.²⁷

Sedangkan menurut Dawam, Keberadaan masyarakat madani tidak bisa dilepaskan dari satu dan lain bentuk kerangka otoritas antar lain negara dalam pengertian modern. Mengacu pada Wuthnow (1989) bahkan ada tiga kerangka kelembagaan dalam masyarakat madani, pertama sektor

²⁶ Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*. Dalam *Jika Rakyat Berkuasa; Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal*, Bandung : Pustaka Hidayah, hlm. 322

²⁷ *Ibid.*, hlm. 324

negara, kedua sektor pasar dan ketiga sektor voluntir yang masing masing mempunyai ciri-ciri tersendiri.²⁸

Esensi sektor negara adalah pemegang monopoli pemaksaan atau kekerasan, esensi sektor pasar adalah orientasi mencari laba, sedangkan esensi sektor voluntir adalah kesukarelaan yang tidak memaksa dan tidak mencari keuntungan. Esensi kelembagaan masyarakat madani adalah mekanisme pasar yang berorientasi pada laba disatu pihak dan kesukarelaan dilain pihak. Dua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat madani mempunyai potensi untuk mandiri (*self-reliance*), mampu berkembang sendiri (*self-generating*), dan swadaya (*self-supporting*), sebagai ciri-ciri yang disebut oleh Tocqueville.²⁹

Muhammad AS Hikam menjelaskan bahwa keberadaan *civil society* yang kuat dan mandiri merupakan salah satu landasan pokok bagi ditegakkannya sistem politik yang demokratik. *Civil society* disini didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara, dengan tumbuh dan berkembangnya *civil society* yang kuat dan mandiri, maka dimungkinkan terwujudnya

²⁸ M. Dawam Rahardjo, *Negara Dan Strategi Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat: Menuju Masyarakat Madani*. Dalam *Jika Rakyat Berkuasa; Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal*, Bandung : Pustaka Hidayah, hlm. 307

²⁹ *Ibid.*, hlm. 307-308

kemampuan mengimbangi dua kekuatan yang cenderung intervensionis yaitu negara dan pasar.³⁰

Namun demikian menurut Hikam bahwa dalam strategi penguatan *civil society* ini, negara tidak langsung dilihat sebagai lawan, sebagaimana pada pengalaman negara-negara totaliter, sebab terdapat pula elemen-elemen negara yang memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan *civil society* yang mandiri, pranata-pranata hukum misalnya masih merupakan ruang publik yang yang perlu didukung meskipun disana dominasi negara cukup besar. Demikian pula gerakan-gerakan kultural dan advokasi dalam masyarakat lebih diarahkan pada penciptaan secara gradual dan evolutif suatu masyarakat politik yang semakin dewasa, sehingga mampu menjadi penyeimbang dan kontrol bagi kecenderungan-kecenderungan eksektif negara³¹

Untuk menganalisis studi ini penulis lebih banyak menggunakan kerangka acuan dari pandangan M. AS Hikam, yang lebih menekankan aspek kemandirian masyarakat sebagai penguatan *civil society*. Dalam konteks organisasi KAMMI, yaitu dengan melihat relevansi peran-peran gerakan yang dimainkan oleh organisasi KAMMI Daerah Yogyakarta serta kiprahnya dalam masyarakat sebagai daya dukung dalam upaya perwujudan masyarakat madani yang ada di Indonesia.

³⁰ Muhammad AS Hikam, *Reformasi Dan Pemberdayaan Civil Society*, Dalam *Jika Rakyat Berkuasa; Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal*, Bandung : Pustaka Hidayah, hlm. 288

³¹ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi Dan Civil Society*, Jakarta : LP3ES. 1999, hlm. 94

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang diperkuat dengan tinjauan pustaka dalam artian peneliti terjun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data dan mengamati obyek penelitian secara langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh), jadi tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dalam suatu keutuhan.³²

b. Subyek dan Lokasi Penelitian

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju oleh peneliti dan menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.³³ Dalam konteks penelitian ini yang menjadi sasaran peneliti adalah kader atau anggota organisasi KAMMI, meliputi anggota yang ada di komisariat atau tingkatan kampus dan Pengurus KAMMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah KAMMI Daerah Yogyakarta yang membawahi beberapa komisariat di wilayah Yogyakarta.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya).1995, hlm. 3

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta). 2002. hlm. 122

c. Pendekatan

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (sosiologi agama). Menurut Keith A. Robert obyek penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi agama memfokuskan pada (1) kelompok-kelompok dan lembaga keagamaan; (2) perilaku individu dalam kelompok tersebut; (3) konflik antar kelompok³⁴

Kajian tentang perilaku meliputi (1) perilaku individu dalam hubungannya dengan keyakinan yang dianut seperti pengalaman keagamaan; (2) perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok; (3) perilaku individu dalam hubungannya dengan pemimpin; (4) perilaku kelompok/ jamaah dalam hubungannya dengan sistem simbol/ doktrin keagamaan tertentu; (5) perilaku kelompok dalam hubungannya dengan pemimpin; (6) stratifikasi sosial; (7) perilaku pemimpin dalam hubungannya dengan doktrin keagamaan; (8) perilaku elit agama dalam hubungannya dengan stratifikasi sosial³⁵.

Dalam konteks penelitian ini pendekatan perilaku yang lebih sesuai adalah pendekatan perilaku kelompok atau perilaku kolektif dalam hubungannya dengan sistem doktrin keagamaan. Jadi bentuk perilaku kolektif dilihat sebagai transformasi dari doktrin keagamaan yang dipahami oleh para aktivis organisasi KAMMI dan diterjemahkan melalui pola gerak dan pola perilaku yang khas.

³⁴ Imam Suprayogo., Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 61

³⁵ Imam Suprayogo., Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, hlm. 61

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi

1. Observasi (pengamatan)

Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁶ Pengamatan dalam hal ini merupakan bagian penting dalam proses pengumpulan data terutama menjadi pendukung untuk meningkatkan kepekaan dalam tehnik wawancara dalam hal ini pengamatan sekaligus menjadi cara untuk melakukan cheking silang (*crosscheck*) hasil wawancara.³⁷ Pengamatan atau observasi yang akan dilakukan meliputi pengamatan murni pada organisasi KAMMI selain itu pengamatan terlibat juga akan dilakukan misalnya mengikuti kegiatan yang dilaksanakan KAMMI, jika hal tersebut diperlukan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara dua pihak. Adapun tujuan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.³⁸ Dalam penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan meliputi dua kategori antara lain wawancara

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research (Jilid 2)*. Yogyakarta : Andi. 2002, hlm. 136

³⁷ Lihat, Moh. Soehadha, *Pengantar Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Buku Daras, Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, 2004 hlm. 56

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian*, hlm. 135

umum dan wawancara mendalam. Wawancara umum dilakukan untuk menggali data yang bersifat umum untuk kepentingan analisis yang hanya bersifat deskriptif semata.³⁹ Sementara itu wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan untuk menggali data yang berasal dari seorang informan kunci (*key informan*) menyangkut data pengalaman individu atau hal-hal khusus dan sangat spesifik.⁴⁰

Wawancara umum akan dilakukan dalam mewawancarai kader atau anggota KAMMI, sedangkan wawancara mendalam akan dilakukan untuk mengajukan pertanyaan pada tokoh kunci dalam hal ini meliputi pengurus dan tokoh-tokoh senior KAMMI.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang bersifat tertulis. Dalam metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.⁴¹ Metode dokumentasi menjadi aspek yang penting dalam penelitian ini karena pendekatan historis tidak mungkin dilakukan tanpa menyelidiki data-data tertulis tentang organisasi KAMMI yang meliputi sejarah serta arsip-arsip organisasi lainnya yang akan mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini.

³⁹ Moh. Soehadha, *Pengantar Metode Penelitian Sosial*, hlm, 50

⁴⁰ Moh. Soehadha, *Pengantar Metode Penelitian Sosial*, hlm, 50

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*, hlm. 135

e. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1994:429) batasan dalam proses analisis data mencakup tiga subproses, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data itu pada hakikatnya sudah dipersiapkan pada saat sebelum dilakukan pengumpulan data, yaitu sejak peneliti melakukan perencanaan dan membuat desain penelitian, dan berlangsung pada saat pengumpulan data dan setelah secara final semua proses pengumpulan data dilakukan.⁴² Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis atau analisis deskriptif, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap bagian dari keseluruhan fokus yang dikaji atau memotong tiap-tiap adegan atau proses dari kejadian sosial atau kebudayaan yang diteliti.⁴³

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail dan utuh tentang gerakan yang dilakukan organisasi KAMMI Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴² Moh. Soehadha, *Pengantar Metode Penelitian Sosial*, hlm. 61

⁴³ Moh. Soehadha, *Pengantar Metode Penelitian Sosial*, hlm. 63

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan, antara lain :

Bab Pertama (BAB I) adalah bab pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian yang akan diteliti selanjutnya rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian, setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori yang akan dipakai dalam menganalisis permasalahan serta telaah pustaka atau tinjauan pustaka. Selanjutnya metodologi penelitian yang akan digunakan dan yang terakhir menguraikan tentang sistematika pembahasan.

Bab Kedua (BAB II) pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum organisasi KAMMI yang mencakup kondisi internal dan eksternal meliputi sejarah terbentuknya, visi misi organisasi, struktur organisasi, serta peran sosial yang dibangun pada ranah kehidupan manusia, selanjutnya pada bab ini juga akan di bahas mengenai konstruksi intelektual yang meliputi ideologi serta prinsip gerakan organisasi KAMMI, serta akar intelektual dari para aktivis ini, sehingga penulis mampu melihat organisasi KAMMI secara utuh dari berbagai dimensi. Bab ini akan menjawab rumusan masalah yang pertama, yakni akan menguraikan tentang konstruksi intelektual tokoh-tokoh KAMMI serta kader-kadernya yang meliputi pendidikan, isu-isu sosial yang direspon, basis keilmuan, keimanan dan keyakinan, sehingga dari bab ini akan

ditelusuri akar intelektual atau ideologis organisasi KAMMI serta perannya dalam merespon kondisi sosial. Sehingga akan diperoleh identifikasi sistem intelektual organisasi KAMMI

Bab Ketiga (BAB III) pada bab ini akan dibahas mengenai urgensi gerakan mahasiswa dalam pembentukan masyarakat madani di Indonesia yang meliputi konseptualisasi masyarakat madani serta signifikansi gerakan mahasiswa terhadap pembentukan masyarakat madani di Indonesia

Bab Keempat (BAB IV) bab ini akan membahas pola gerakan sosial organisasi KAMMI dalam pembentukan masyarakat madani yang dalam penelitian ini mengambil fokus pada organisasi KAMMI yang berada di wilayah Yogyakarta, yang meliputi dinamika isu yang diperjuangkan serta yang di bangun oleh KAMMI dalam ranah sosial, tipologi gerakan KAMMI serta menganalisis relevansi peran sosial gerakan KAMMI dalam pembentukan masyarakat madani di Indonesia

Bab Kelima (BAB V) bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan analisis yang telah dipaparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Konstruksi intelektual dari organisasi KAMMI secara umum banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir dari Timur Tengah terutama banyak mengadopsi dari pemikiran aktivis *Ikhwanul Muslimin* yang tokoh utamanya adalah Hasan Al-Banna yang berorientasi pada pemurnian ajaran agama dan pemahaman doktrin keislaman yang normatif. Islam dipahami sebagai agama yang bukan hanya mengajarkan tata cara peribadatan melainkan semua aspek-aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik yang didasarkan pada sumber al-qur'an dan hadits sehingga melahirkan pemahaman keislaman yang normatif dan menolak sama sekali pemikiran Barat dengan asumsi bahwa Islam telah mampu menjawab semua persoalan umat. Doktrin ini mengakar sedemikian kuat dan diterjemahkan dalam kehidupan praksis para kadernya seperti kekhasan cara berpakaian, bersikap, dan berperilaku serta mempengaruhi ekspresi-ekspresi politik dan kiprah kemasyarakatan yang selalu

mengasumsikan ciri yang islami dengan pengabsahan setiap geraknya menggunakan legitmasi Al-Qur'an dan Hadits.

2. Peran sosial KAMMI Daerah Yogyakarta terbagi menjadi dua wilayah yang *pertama* adalah wilayah politik atau kebijakan publik yang berorientasi untuk merespon kebijakan-kebijakan pemerintah lebih khusus pemerintah daerah (lokal Yogyakarta) dalam hal ini konsentrasi isu yang menjadi fokus kajian adalah reformasi birokrasi yang berorientasi menciptakan pemerintahan Yogyakarta yang bersih dan berwibawa, sehingga kasus-kasus yang disoroti seperti moralitas pemimpin dalam hal ini korupsi Bupati Sleman, transparansi anggaran terutama pendidikan serta hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi. Dalam wilayah ini organisasi KAMMI mempunyai kontribusi yang cukup positif sebagai salah satu kekuatan pengimbang dari kekuasaan negara yang intensionis. *Kedua*, pada wilayah sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada pemuda dan kemandirian ekonomi. Namun dalam wilayah ini peran KAMMI belum maksimal pada wilayah pemberdayaan sebagai syarat penciptaan kemandirian masyarakat yang menjadi pilar utama masyarakat madani. Hal ini dikarenakan secara umum kiprah sosial kemasyarakatan yang dibangun oleh organisasi KAMMI melalui desa-desa mitranya baru pada dataran kegiatan yang belum berimplikasi jangka panjang seperti Baksos, pengajian, TPA, dan kegiatan-kegiatan aksidental seperti pada momen-momen hari besar Islam. Meskipun

sudah ada derah percontohan untuk bidang pemberdayaan, pada dataran aplikatifnya belum maksimal.

B. SARAN

Penulis akan menyampaikan saran atas data-data yang penulis peroleh melalui penelitian tentang "Peran Gerakan Mahasiswa Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia; Studi Terhadap Organisasi KAMMI Daerah Yogyakarta" besar harapan penulis semoga apa yang telah penulis kerjakan bermanfaat sebagai bahan masukan dan kritikan untuk membangun organisasi yang lebih baik.

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan antara lain: hendaknya kiprah-kiprah sosial kemasyarakatan yang dilakukan untuk penguatan basis ekonomi masyarakat dapat dijalankan sesuai dengan konsep yang ingin coba diwujudkan pada dataran praksisnya, karena kegiatan-kegiatan yang bersifat aksidental tidak akan bermanfaat dalam jangka panjang terutama pada wilayah ekonomi, malah akan melahirkan budaya ketergantungan yang tinggi terhadap organisasi. dan hal ini merupakan budaya yang kurang mendidik dalam upaya membangun kemandirian dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian maka KAMMI sebagai organisasi yang mempunyai potensi sebagai penguatan *civil society* atau masyarakat

madani, perlu mengoptimalkan peran-peran pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kegiatan yang mempunyai kontribusi jangka panjang untuk masyarakat bukan hanya pada wilayah basis religius (agama) saja. Tetapi kontribusi pada wilayah ekonomi, juga harus dilakukan karena prasyarat mutlak kemandirian masyarakat adalah kemandirian pada wilayah ekonomi sehingga masyarakat mempunyai bargaining position dan pengaruh politik yang kuat dalam berhadapan dengan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta : IAIN Jakarta. 2000
- Abdillah, Masykuri. *Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Masa Kini*. dalam *Islam Negara dan Civil society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Adams, ian. *Ideologi Politik Mutakhir; Konsep Ragam Kritik Dan Masa Depan*. (Yogyakarta : QALAM). 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : PT Rineka Cipta). 2002.
- Culla Adi Suryadi. *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik Dan Sejarah Indonesia (1908-1998)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1999.
- *Masyarakat Madani; Pemikiran, Teori, Dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
- Damanik, Said Ali, *Fenomena Partai Keadilan*, Bandung: TERAJU. 2003
- Djamas, Nurhayati. *Gerakan Kaum Muda Islam Masjid Salman dalam Abdul Aziz Dkk (ed), Gerakan Islam Kontemporer Di Indonesia* , Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Effendi, Bahtiar. *Masyarakat Agama Dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani Dan Etos Kewirausahaan*. Yogyakarta : Galang Press. 2001.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research (Jilid 2)*, Yogyakarta : Andi, 2002.
- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil society*. Jakarta LP3ES. 1999.
- , *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Latif, Yudi. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke- 20*. Bandung: MIZAN 2005.

- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta : PARAMADINA bekerjasama dengan PT DIAN RAKYAT. 2008.
- Mahardika, Timur. *Gerakan Massa: Mengupayakan Demokrasi Dan Keadilan Secara Damai*. (Yogyakarta: LAPERA PUSTAKA UTAMA).2000.
- Moedjiono, Imam. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Yogyakarta: UII press, 2002.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.1995
- Muhammad Thahan, Musthafa. *Al fikiran Al Islami Al Mu'ashir*, terj. Akmal Burhanudin, *Pemikiran Moderat Hasan Al Banna*. Bandung : Harakatuna, 2007.
- Mu'ti, Abdul. *Pendidikan Yang Membebaskan Untuk Masyarakat Madani*. Dalam *Siasat Gerakan Kota:Jalan Menuju Masyarakat Baru*. Imam subkhan (ed). Yogyakarta : Shalahuddin. 2003.
- Prasetyo, Hendro , Ali Munhanif dkk. *Islam dan Civil society; Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM-IAIN Jakarta. 2002.
- Putra, Fadillah Dkk (tim penulis). *Gerakan Sosial; Konsep,Strategi,Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*.(Malang : Placid's bekerjasama dengan Averroes Press). 2006.
- Raharjo, Dawam. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa; Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung : MIZAN. 1999.
- . *Masyarakat Madani: Agama Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta LP3ES kerjasama dengan LSAF. 1999
- Rahmat, Andi dan Muhammad Najib. : *Gerakan perlawanan dari masjid kampus* Yogyakarta: profetika. 2007
- Rais M. Amien, Taufik Abdullah dkk. *Jika Rakyat Berkuasa; Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal*. Bandung : Pustaka Hidayah. 1999
- Sanit, Arbi. *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral Dan Politik*. Yogyakarta: INSIST press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. 1999.

- Sidiq, Mahfudz. *KAMMI Dan Pergulatan Reformasi: Kiprah Politik Aktivis Dakwah Kampus Dalam Perjuangan Demokrasi Ditengah Gelombang Krisis Nasional Multi Dimensi*. (Solo : ERA INTERMEDIA). 2003.
- Soehadha, Moh., *Pengantar Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Buku Daras, Yogyakarta: Tidak Diterbitkan. 2004
- Suharsih dan Ign Mahendra K. *Bergerak Bersama Rakyat; Sejarah Gerakan Mahasiswa Dan Perubahan Sosial Di Indonesia*. Yogyakarta: Resist Book. 2007
- Sukarman, Widigdo, *Sikap Dunia Pendidikan Dalam Era Globalisasi*. Dalam Suprayogo, Imam. Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 2003.
- Suprianto, Edy *Gerakan Mahasiswa Dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia ; Studi Terhadap Peranan HMI-MPO Cab. Yogyakarta Tahun 1998-2004*. Skripsi (tidak dipublikasikan) UIN Sunan Kalijaga Fak. Ushuluddin.
- Yoedhanegara, Pradipa. *Desentralisasi Gerakan Mahasiswa*.(Jakarta: DPP Aliansi Wartawan Indonesia). Cet.1. 2005

B. Jurnal

- Damami Mohammad. *Gerakan Sosial Keagamaan*. Dalam Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Prodi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Vol.2, No.1, Januari-Juni 2008

C. Internet

KAMMI online, www.KAMMI.or.id

Cahyono, Imam. *Melacak Akar Ideologi Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia*. www.geocities.com/jurnal_iitindonesia/gerakan_mhs_Islam.htm

Jannah, Maulana . *Menggeser Paradigma Gerakan Mahasiswa* <http://66.218.69.11/search/cache?ei=UTF-KAMMI.or.id>.

Indrawan, Rully, *Masyarakat Madani*, <http://rully-indrawan.tripod.com/rully01.htm>, diakses 15 Desember pkl.21.15

Amin Sudarsono, *Ideologi dan Gerakan KAMMI*, <http://Jelajahsemesta.Blogspot.Com>, diakses 15 desember 2008 pkl. 21.15

D. Majalah

Sudjito, Arie Dkk. *"Di Tikungan Reformasi Mahasiswa Kebingungan."* Dalam *Majalah Basis*. Nomor 07-08, tahun ke 47, edisi Juli- Agustus 1998

Nyarwie Ar Rembangie. *"Gerakan Mahasiswa Di Negara Dunia Ketiga: Pergulatan Format Dan Ideologi Dalam Arus Globalisasi."* Dalam *Majalah Tradem* edisi Ketiga Februari-April 2002.

Hutagalung, Daniel, *"Laclau dan Mouffe Tentang Gerakan Sosial."* Dalam *Majalah Basis*. Nomor 01-02, Tahun ke-55. edisi Januari-Februari 2006.

E. Sumber-Sumber Lain (Arsip Dan Dokumen)

1. GBHK (Garis Besar Halauan Kerja) KAMMI Daerah Yogyakarta periode 2008-2010
2. GBHO (Garis Besar Halauan Organisasi) KAMMI Pusat

Lampiran I

Daftar Informan (Wawancara)

1. Jatmiko (Ketua Umum KAMMI Daerah Yogyakarta periode 2008-2010)
2. Purwoko Kurniawan (ketua umum KAMMI Daerah Yogyakarta periode 1998-2000)
3. M. Nasir (Sekretaris Umum KAMMI Daerah Yogyakarta periode 2008-2010)
4. Basuki (Ketua Departemen Sosial Kemasyarakatan KAMMI Daerah Yogyakarta periode 2008-2010)
5. Dahlia Ilinda (Ketua Departemen Sosial Kemasyarakatan KAMMI Daerah Yogyakarta periode 2006-2008)
6. Maringan Wahyudianto (Ketua Departemen Kebijakan Publik KAMMI Daerah Yogyakarta periode 2008-2010)
7. Ana Khairun Nisa (Sekretaris Umum KAMMI Komisariat UIN Sunan Kalijaga)
8. Setiawan (Kader KAMMI UIN)
9. Dendi Sutarto (Kader KAMMI UIN)

Lampiran II

Daftar Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Sejarah terbentuknya KAMMI DIY?
2. Bagaimana gambaran umum pola koordinasi organisasi KAMMI secara keseluruhan?
3. Apa dan bagaimana ideologi organisasi KAMMI?
4. Bagaimana struktur pengurus KAMMI Daerah Yogyakarta?
5. Orientasi yang hendak dicapai masing-masing departemen seperti apa ?
6. Apa saja bentuk program kerja yang menjadi garapan organisasi dari masing-masing bidang?
7. Bagaimana Konsentrasi isu kedaerahan yang menjadi fokus perjuangan dalam periode ini dan sebelumnya?
8. Apa dan bagaimana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan pada desa mitra?
9. Apa dan bagaimana materi-materi perkaderan (DM/ Daurah Marhalah) serta materi diskusi yang biasa digunakan serta didiskusikan
10. Bagaimana prinsip-prinsip gerakan dalam masing-masing departemen
11. Referensi buku rujukan mengacu pada tokoh atau buku apa?

Lampiran III

Deklarasi malang

Bismillahirrahmanirrahim

Didasari keprihatinan mendalam terhadap krisis nasional yang melanda negeri ini dan didorong tanggung jawab moral terhadap penderitaan rakyat yang masih terus berlangsung serta iktikad baik untuk tetap berperan aktif dalam poroses perubahan dan perbaikan maka kami segenap mahasiswa muslim indonesia mendeklarasikan lahirnya:

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

(KAMMI)

Selanjutnya KAMMI menempatkan diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rakyat dan akan senantiasa berbuat untuk kebaikan bangsa dan rakyat Indonesia.

Malang, 29 maret 1998

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

(KAMMI)

Dewan Pengurus

Ketua Umum

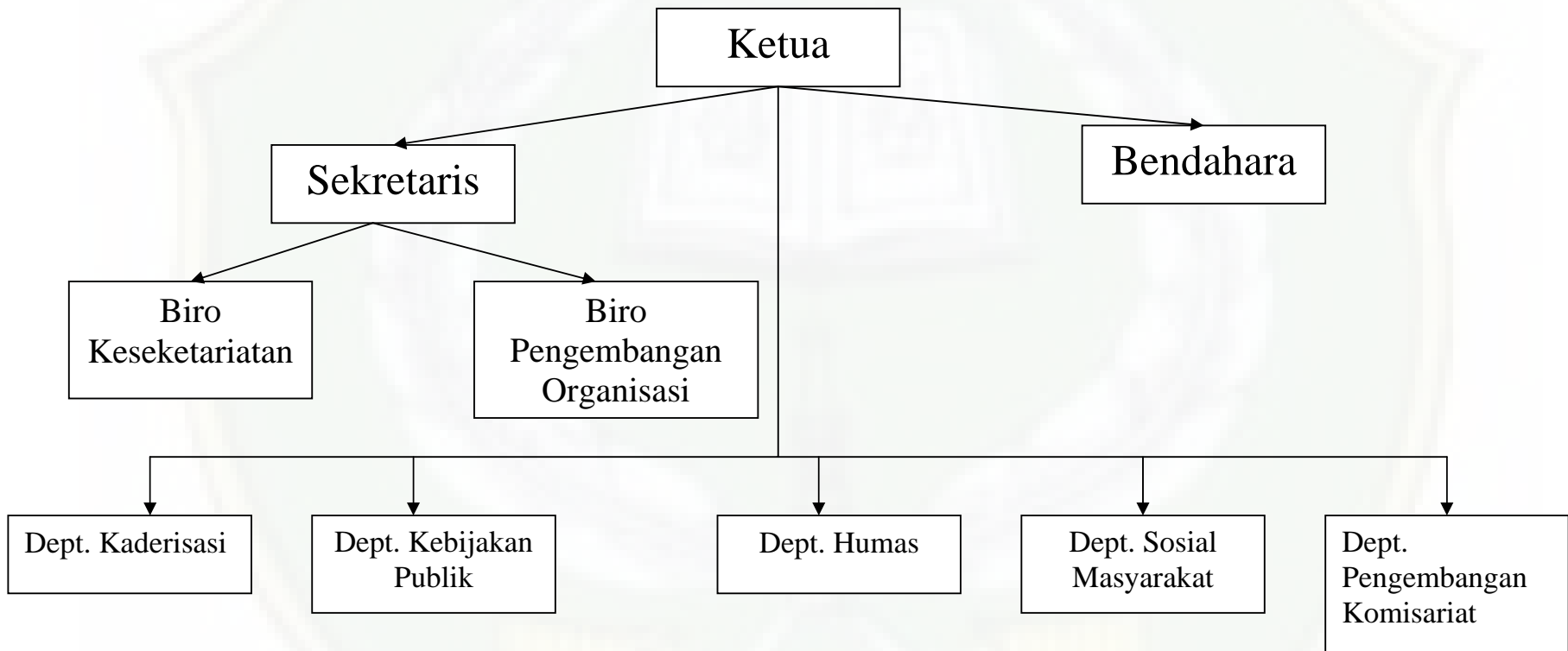
Sekretaris Umum

Fahri Hamzah

Haryo Setyoko

Lampiran IV

Struktur Pengurus KAMMI DIY





KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
(KAMMI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Anggajaya I No.185 A Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Website : www.kammi.or.id atau e-mail : sekretaris_kdjogja@yahoo.co.id

**Garis-Garis Besar Haluan Kerja
KAMMI DIY
Periode 2008-2010**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1
Pengertian

Garis-garis Besar Haluan Kerja KAMMI DIY adalah kerangka operasional organisasi dalam rencana pengembangan dan arah yang terwujud dalam program-program kerja secara menyeluruh, terarah dan terpadu

Pasal 2
Fungsi

Garis-garis Besar Haluan Kerja berfungsi sebagai pedoman bagi pengurus dalam menyusun dan melaksanakan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi

**BAB II
POLA DASAR PENGEMBANGAN ORGANISASI**

Pasal 3
Tujuan Organisasi

Tujuan yang hendak di capai KAMMI adalah ” **Menjadi *avant garde/ mainstream* gerakan mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta**” dengan penjabaran:

1. Pengokohan kaderisasi
2. Tata kelola lembaga yang professional dan mapan
3. Jaringan yang luas dan solid
4. *Opinion Leader Gerakan*
5. memiliki basis sosial yang kokoh dan berkelanjutan sebagai manifestasi *imagine community* KAMMI
6. Menjadi pelaku rekonsiliasi sosial / *islahul ummah*

Pasal 4
Pemotretan Kondisi

Kondisi Internal :

Pendukung :

1. Besarnya kuantitas kader KAMMI
2. Keberagaman potensi kader
3. Jumlah jaringan KAMMI DIY yang luas
4. Menguatnya pengaruh KAMMI DIY di beberapa kampus besar di Yogyakarta
5. Cukup mapannya sistem kaderisasi
6. Mulai terbangunnya kesadaran akan lokalitas kedaerahan
7. Menguatnya nalar kontribusi pada diri kader
8. Mulai tercitrakannya KAMMI dalam mempengaruhi kebijakan daerah
9. Terciptanya *supporting system* dalam gerak KAMMI

Penghambat

1. Kurangnya profesionalisme pengelolaan organisasi
2. Menurunnya kualitas ma'naviyah kader
3. Masih lemahnya komunikasi antara KAMDA dan Komisariat
4. Lemahnya kemandirian ekonomi KAMMI
5. Belum optimalnya fungsi penelitian dan Pengembangan Organisasi
6. Kefahaman mabda, manhaj dan fikrah gerakan yang kurang
7. Kultur intelektual yang belum mapan (rendah)

Kondisi Eksternal :

Faktor Pendukung :

1. Aspek-aspek positif dari proses demokatisasi yang berlangsung di Indonesia
2. Aspek-aspek positif dari kebijakan otonomi daerah yang berlangsung di Indonesia
3. Terbukanya ruang partisipasi publik bagi gerakan mahasiswa.
4. Menguatnya konsolidasi kekuatan Islam
5. Yogyakarta sebagai kota tujuan belajar mahasiswa.
6. Pergerakan pemuda dan mahasiswa yang tumbuh subur.
7. Tersedianya begitu banyak referensi (cendekiawan, tokoh politik, perpustakaan)



KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
(KAMMI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Anggajaya I No.185 A Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Website : www.kammi.or.id atau e-mail : sekretaris_kdjogja@yahoo.co.id

8. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung kecepatan arus informasi dan komunikasi.
9. Munculnya kebangkitan kesadaran umat dalam melakukan pembelaan atas hak-hak politik dan hak-hak sipil mereka.
10. Momentum PEMILU 2009
11. Terjadinya peningkatan dinamika gerakan di 100-Tahun lahirnya gerakan
12. Terbukanya kran partisipasi bagi civil society untuk menentukan status Daerah Istimewa Yogyakarta (penyusunan RUU-K)

Faktor Penghambat :

1. Belum terpenuhinya visi reformasi.
2. Budaya feodalisme di Yogyakarta.
3. Masyarakat yang masih percaya terhadap hal-hal yang bersifat mistis.
4. Gaya hidup yang cenderung pragmatis dan hedonis di kalangan mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta.
5. Memudarnya citra Yogyakarta sebagai kota Pelajar.
6. Tingginya biaya pendidikan.
7. Persepsi negative public thd KAMMI sebagai *underbow* partai tertentu.
8. Apatisme masyarakat terhadap politik
9. Jumlah mahasiswa yang berkurang
10. kebijakan kampus yang menuntut keterlibatan akademik penuh mahasiswa, yang mempersempit keterlibatan mahasiswa dengan gerakan mahasiswa
11. Kondisi kampus yang menjadikan ditariknya kader ke kampus (krisis kader misalnya)

Pasal 5
Strategi Pencapaian
Strategi pencapaian tujuan KAMMI yaitu

Pengokohan Kaderisasi

- a. Variasi rekrutmen
- b. optimalisasi bulan-bulan kaderisasi
- c. Berjalannya koordinasi dan konsolidasi pengkader melalui rakorbid, pertemuan komander dan HI
- d. Pelaksanaan TFI dan DPMK 1 secara periodik (terjadual)
- e. Sinergitas pengelolaan AB 2 dengan departemen terkait

Tata kelola lembaga yang profesional dan mapan

- a. Manajemen lembaga berbasis misi dan kinerja
- b. Implementasi SMDK sampai dataran komisariat

Menjadi *opinion leader* Gerakan

- a. Membentuk gugus-gugus kajian berbasis latar belakang akademis
- b. Pengembangan komisariat berbasis *core competence*
- c. perluasan dan penguatan jejaring media _ocial

Memiliki Jaringan yang luas dan solid

Menjadikan pemeliharaan dan pentradisian jaringan sebagai salah satu proses wajib dalam kaderisasi

Memiliki Basis Sosial

- a. pembentukan gugus gerak _ocial berbasis wilayah
- b. Menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu proses wajib dalam kaderisasi

Menjadi Pelaku Utama Rekonsiliasi Sosial (islahul ummah)

- a. *Positioning* KAMMI sebagai gerakan moderat dan terbuka
- b. membangun komunikasi positif dengan berbagai elemen

**BAB III
FUNGSI ORGANISASI**

Pasal 8

Fungsi Pengkaderan

Tujuan : Melakukan pengkaderan untuk terwujudnya kader yang memenuhi Indek Jatidiri kader (IJK)

Sasaran: Kader

Prinsip pengkaderan:

1. Mengelola dan menanamkan seluruh aspek-aspek baik aqidah, manhaj, fikriah, siyasiah, jaringan dan *skill* yang bermuara pada pembentukan kepribadian kader yang Islami dan bervisi sosial dan politik.
2. Menerapkan prinsip tawazun, alamiyah dan istimroriyah dan sesuai dengan penjenjangan kader yang dilakukan oleh KAMMI.



**KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
(KAMMI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jl. Anggajaya I No.185 A Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Website : www.kammi.or.id atau e-mail : sekretaris_kdjogja@yahoo.co.id

3. Menumbuhkembangkan dan memberdayakan potensi kader

Pasal 9

Fungsi Pengkajian

Tujuan : Melakukan pengkajian, merespon dan membuat kebijakan politik terhadap isue daerah, nasional maupun internasional.

Sasaran : Kader dan masyarakat umum

Prinsip Pengkajian :

1. Adanya kejelasan sumber data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai modal untuk merespon isu sosial dan politik
2. Melakukan analisa yang berbasis pada keilmuan yang mantap
3. Memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat.

Pasal 10

Fungsi Jaringan

Tujuan : Membentuk dan mengkoordinasi serta mengkonsolidasikan jaringan internal maupun eksternal yang dapat memfasilitasi pencapaian tujuan gerakan.

Sasaran : Seluruh institusi KAMMI dan pelaku-pelaku *public sector*, *private sector* serta *third sector*

Prinsip Jaringan:

1. Ukhuwah dan silaturrohim.
2. Menjaga kehormatan institusi
3. Berpengaruh dan membawa kebaikan
4. Ekspansif dan produktif
5. Kemitraan

Pasal 11

Fungsi Kehumasan

Tujuan: Membentuk opini, pencitraan dan mensosialisasikan kebijakan KAMMI kepada masyarakat.

sasaran : Media, Publik secara umum, tokoh, dan lembaga-lembaga lain

Prinsip humas :

1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan aktivitas kepada masyarakat.
2. Mempengaruhi opini masyarakat sehingga terbentuk kefahaman dan pemihakan untuk tercapainya visi dan misi KAMMI

Pasal 12

Fungsi Pengembangan Organisasi

Tujuan : Melakukan proses pengembangan organisasi berbasis riset menuju sistem yang progresif, efektif dan efisien.

Sasaran : Sistem, pengurus, dan kader.

Prinsip Pengembangan Organisasi :

1. Mendasarkan pada data-data yang sah dan faktual
2. Terukur dan berkelanjutan

Pasal 13

Fungsi Sosial Kemasyarakatan

Tujuan : Melakukan kemitraan, pendampingan dan pemberdayaan terhadap potensi-potensi dalam masyarakat guna terciptanya basis sosial.

Sasaran : Masyarakat

Prinsip pemberdayaan Masyarakat:

1. Melakukan pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat sebagai investasi jangka panjang pembentukan basis sosial.
2. Memanfaatkan berbagai jaringan yang dimiliki untuk terberdayakannya masyarakat.

BAB IV

ARAHAN KERJA ORGANISASI

Pasal 14

Badan Permusyawaratan Daerah

Arahan Kerja

1. Mengawasi kinerja pengurus KAMMI dan memberikan peringatan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan organisasi
2. Memberikan pertimbangan dan saran keorganisasian kepada pengurus KAMMI dalam menentukan kebijakan organisasi KAMMI.
3. Menyelenggarakan pengadilan bagi anggota terhadap aturan organisasi.
4. Memutuskan mengadakan musyawarah daerah luar biasa apabila diminta sesuai dengan aturan organisasi.



KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
(KAMMI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Anggajaya I No.185 A Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Website : www.kammi.or.id atau e-mail : sekretaris_kdjogja@yahoo.co.id

Pasal 15
Dewan Penasihat

Arahan Kerja:

1. Mengayomi dan membina organisasi sehingga dapat berkembang dengan baik dan mampu mewujudkan tujuan berdirinya KAMMI.
2. Memberikan pertimbangan syar'i, akademik maupun politis sebagai kebijakan KAMMI.

Pasal 16
Ketua

Arahan Kerja:

1. Membuat kebijakan dan arahan umum pelaksanaan hasil-hasil Musyda.
2. Memimpin KAMMI Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal organisasi KAMMI.
3. Bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi
4. Mewakili KAMMI Daerah serta bertindak ke luar dan atau ke dalam untuk dan atas nama KAMMI Daerah sesuai dengan garis kebijakan organisasi.
5. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan Departmen KAMMI Daerah.
6. Bersama Ketua Bidang Kebijakan Publik membangun hubungan dan komunikasi politik dengan institusi/pihak lain sesuai dengan sikap dan kebijakan internal KAMMI.
7. Dalam keadaan berhalangan dapat mengamanahkan tugas Ketua kepada Sekretaris.
8. Mengangkat, memberhentikan dan memutasi pengurus dengan pertimbangan pengurus harian.
9. Mewakili KAMMI secara eksternal.

Pasal 17
Sekretaris

Arahan Kerja:

1. Mendampingi Ketua untuk bertindak atas nama KAMMI sesuai dengan garis kebijakan organisasi.
2. Bertanggung jawab terhadap tata kelola organisasi
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan setiap departemen.

4. Membantu ketua membuat kebijakan-kebijakan khusus yang dipandang perlu guna keselamatan organisasi.
5. Berkewajiban menggantikan ketua apabila Ketua berhalangan.
6. Membuat kebijakan yang berkait dengan administrasi dan kesekretariatan guna lancarnya organisasi.
7. Menkordinasi biro kesekretariatan dan Biro Pengembangan Organisasi
8. Menjadi pejabat sementara ketika ketua berhalangan hingga terlaksananya Musyda/Musydalub.
9. Menyampaikan kebijakan kepada seluruh jajaran pengurus KAMMI DIY.
10. Mengusulkan pemberhentian, pengangkatan dan pemutasian pengurus.
11. Bertanggung jawab kepada Ketua

Pasal 18
Biro Kesekretariatan

Arahan Kerja:

1. Bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang berhubungan dengan administrasi organisasi
2. Bertanggungjawab penuh terhadap segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat (pembuatan, pengarsipan dan pengagendaan).
3. Mendokumentasikan hasil-hasil persidangan baik persidangan di tingkat pengurus harian maupun persidangan di tingkat bidang.
4. Mengatur kerumahtanggaan sekretariat KAMMI.
5. Mengadakan dan mengelola perpustakaan KAMMI
6. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
7. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan KAMMI.
8. Dalam menjalankan tugasnya dapat mengangkat staff.

Pasal 19
Biro Pengembangan Organisasi

Arahan Kerja :

1. Melakukan riset pengembangan organisasi
2. Menyusun database berdasarkan riset yang dilakukan



KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
(KAMMI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Anggajaya I No.185 A Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Website : www.kammi.or.id atau e-mail : sekretaris_kdjogja@yahoo.co.id

3. Memantau, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi proses berjalannya tata kelola organisasi.

Pasal 20
Bendahara

Arahan Kerja:

1. Menyusun dan menetapkan tata kelola keuangan KAMMI Daerah sesuai dengan *Standard Operational Procedure*.
2. Melakukan upaya penggalan dana.
3. Menyusun sistem akuntansi keuangan organisasi.
4. Membuat serta melaporkan kondisi keuangan organisasi.
5. Mengkoordinir iuran anggota bersama bendahara komisariat.
6. Membuat badan kelengkapan sendiri yang dipandang perlu guna memperlancar tugas-tugasnya dengan persetujuan ketua.

Pasal 21
Departemen Pengkaderan

Arahan Kerja:

1. Mengimplementasikan pengkaderan KAMMI secara integral bersama dengan departemen terkait.
2. Mengkoordinasikan peran dan fungsi kaderisasi di komisariat khususnya pengelolaan AB I
3. Menyelenggarakan, mengevaluasi dan mensupervisi Dauroh Marhalah II
4. Menyelenggarakan MK II
5. Mengelola AB II dalam kerangka peningkatan kualitas kader
6. Melakukan rekrutmen dan mengelola kader untuk kampus-kampus yang belum memiliki komisariat
7. Melaksanakan akreditasi kader AB II guna melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas *tarbawiyah* kader KAMMI.
8. Membuat badan kelengkapan sendiri yang dipandang perlu guna memperlancar tugas-tugasnya dengan persetujuan ketua.
9. Mengkoordinasikan KID dan Komander.
10. Mendorong KID untuk menjadi LSO
11. Dalam menjalankan tugasnya departemen dapat mengangkat staff departemen.

12. Bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 22
Departemen Kebijakan Publik

Arahan kerja:

1. Melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik terutama di daerah dengan memperhatikan prinsip kebenaran, keadilan dan keberpihakan terhadap umat.
2. Bersama Ketua Umum menentukan kebijakan politik yang harus diambil oleh organisasi.
3. Melakukan upaya-upaya pencerdasan kader dengan penguatan kultur intelektual di tingkat daerah.
4. Menciptakan suasana kondusif bagi upaya pengkaderan politik.
5. Mengkoordinasi dan mengkondolidasi wacana dan kaderisasi politik di tingkat komisariat dengan sepengetahuan ketua komisariat.
6. Menginisiasi gugus kajian berbasis *core competence*
7. Menginisiasi gugus gerak politik berbasis wilayah
8. Membuat badan kelengkapan sendiri yang dipandang perlu guna memperlancar tugas-tugasnya dengan persetujuan ketua.
9. Bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 23
Departemen Pengembangan Komisariat

Arahan Kerja:

1. Melakukan analisa pengembangan komisariat.
2. Melakukan proses pemantauan, pendampingan dan evaluasi komisariat.
3. Membuat pola hubungan KAMMI Daerah dengan Komisariat dan antar KAMMI Komisariat sehingga terjadi harmonisasi dan sinergisitas kerja.
4. Melakukan akreditasi komisariat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan *treatment* komisariat.
5. Melakukan penjenjangan komisariat.
6. Melakukan pendataan dan studi kelayakan calon komisariat.
7. Mentransformasikan kebijakan pusat dan daerah kepada seluruh Komisariat.
8. Mengkoordinasikan komisariat untuk menentukan kebijakan politik kampus.
9. Melakukan ekspansi kewilayahan pada kampus-kampus yang belum ada komisariatnya.



KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
(KAMMI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Anggajaya I No.185 A Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Website : www.kammi.or.id atau e-mail : sekretaris_kdjogja@yahoo.co.id

10. Dalam menjalankan tugasnya dapat mengangkat staff atas persetujuan ketua.
11. Bertanggungjawab terhadap ketua.

Pasal 24
Departemen Humas

Arahan Kerja :

1. Membuat jaringan kerja dengan media massa.
2. Bertugas melakukan hubungan yang harmonis dengan elemen, lembaga dan berbagai unsur masyarakat untuk tercitrakannya secara baik nama KAMMI.
3. Melakukan sosialisasi berbagai kebijakan politik KAMMI ke seluruh masyarakat.
4. Membuat media internal dan eksternal KAMMI.
5. Bertanggung jawab atas arus informasi dan pembangunan citra KAMMI
6. Bertanggung jawab kepada ketua

Pasal 25
Departemen Sosial kemasyarakatan

Arahan kerja:

1. Sebagai fasilitator interaksi antar kader dan masyarakat.
2. Membangun jaringan untuk menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
3. Mengawal keberlanjutan proses kiprah sosial kemasyarakatan.
4. Menginisiasi gugus gerak sosial kemasyarakatan berbasis wilayah.
5. Bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 26
LSO BUMK

Arahan Kerja :

1. Bertanggungjawab atas daya dukung keuangan KAMMI DIY.
2. Mengembangkan usaha mandiri dengan prinsip profit dan halal.
3. Mengelola potensi keuangan dari internal maupun eksternal organisasi.
4. Bertanggung jawab kepada ketua.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
Terlampir

BAB VI
STANDAR KEBERHASILAN
Pasal 27
Standar Keberhasilan
KAMMI Yogyakarta 2008-2010

1. Pengokohan Kaderisasi

1.1. Tingkat pertumbuhan jumlah kader stabil, yang ditandai dengan patokan

Tingkat pertumbuhan AB I

- a. untuk komisariat grade A, setiap periode bertambah seorang-kurangnya 50 kader
- b. untuk komisariat grade B, setiap periode bertambah seorang-kurangnya 35 kader
- c. untuk komisariat grade C, setiap periode bertambah seorang-kurangnya 20 kader

Tingkat pertumbuhan AB II

- a. untuk komisariat grade A, setiap periode bertambah seorang-kurangnya 10
- b. untuk komisariat grade B, setiap periode bertambah seorang-kurangnya 7
- c. untuk komisariat grade C, setiap periode bertambah seorang-kurangnya 4

1.2. Stabilitas pelaksanaan manhaj 1427 H

- normalnya pola kaderisasi
- Adanya sistem pemantauan dan evaluasi manhaj 1427

1.3. Optimalnya perangkat-perangkat pengkader

- > ketersediaannya jumlah pemandu dan Instruktur yang memenuhi kualifikasi
- > jumlah instruktur tiap komisariat berjumlah 4 orang
- > rasio pemandu 1:5
- Berjalannya proses pengelolaan AB 2
- > terlaksananya sarana-sarana kaderisasi

2. Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Mapan

- Tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel
- Kerapian tata administrasi



KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
(KAMMI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Anggajaya I No.185 A Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Website : www.kammi.or.id atau e-mail : sekretaris_kdjogja@yahoo.co.id

3. Jaringan yang Luas dan Solid

- Memiliki jaringan di 3 sektor kehidupan:
 - Public sector* : Eksekutif, legislatif
 - Private sector* : Pelaku dunia usaha dan ekonomi
 - Third sector* : Organ-organ *civil society*
- Terjalannya kerjasama gerak berdasarkan kesamaan orientasi dengan jaringan yang dimiliki.

4. Menjadi *Opinion Leader* Gerakan

- pemuatan *statement* dan atau tulisan kader minimal sebulan sekali.
- kader menjadi referensi / rujukan sebagai narasumber

5. memiliki basis sosial yang kokoh dan *sustainable* sebagai manifestasi *imagine community* KAMMI

- Memiliki formulasi tatanan masyarakat ideal versi KAMMI
- Memiliki formulasi metode pemberdayaan yang khas KAMMI
- Terbentuknya sekurang-kurangnya 5 daerah mitra

6. Menjadi Pelaku Rekonsiliasi Sosial (*islahul ummah*)

- Terlibat aktif dalam forum ukhuwah islamiyah
- Menjadi mediator aliansi gerakan mahasiswa muslim

BAB VII PENUTUP

Pasal 28

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui(Qs.al anfal:27)

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

Bab I

Pengertian

Pasal 1

Pengertian

Dalam pasal berikut ini yang dimaksud dengan:

1. GBHO (Garis-garis Besar Haluan Organisasi) adalah rumusan yang disusun secara sistematis, terarah, dan terpadu yang meliputi filosofi gerakan, pemosisian gerakan, dan haluan gerakan untuk memberikan arah bagi perjuangan KAMMI dalam mewujudkan visi dan misinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar KAMMI. GBHO merupakan landasan operasional gerakan.
2. Visi KAMMI adalah tujuan yang hendak dicapai atau kondisi yang ingin diwujudkan oleh KAMMI, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar KAMMI Pasal 6
3. Misi KAMMI adalah pernyataan eksistensi dan alasan keberadaan KAMMI sebagai perincian atas Visi KAMMI, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar KAMMI Pasal 7.
4. Kredo Gerakan adalah jati diri yang mewujud (*manjud*) dalam kehidupan kepribadian kader KAMMI dan menjadi ruh yang senantiasa terwariskan dari generasi ke generasi. Kredo Gerakan adalah cara pandang kader KAMMI terhadap dirinya sendiri, obsesinya, atributnya, dan hakikatnya yang meneguhkan peran kader di dalam kehidupannya. Kredo Gerakan adalah semangat yang menjiwai kader KAMMI sebagai sumber tenaga untuk bergerak, berjuang, mendobrak semua penghalang, dan kesungguhan untuk beramal mencapai tujuan.
5. Prinsip Gerakan KAMMI adalah nilai-nilai dasar gerakan yang menjiwai pergerakan KAMMI sebagai suatu *amal jama'i*.
6. Prinsip Gerakan adalah ciri khas pergerakan KAMMI yang secara unik membedakannya dengan gerakan lain. Prinsip Gerakan merupakan tradisi yang menjadi tetapan (*tsawabit*) gerakan dan menjadi tolok ukur konsistensi (*asholah*) gerakan KAMMI.
7. Karakter Organisasi KAMMI adalah sifat keorganisasian yang melekat yang menjadi ciri khas dan melandasi aktivitas gerakan KAMMI.
8. Paradigma Gerakan KAMMI adalah cara pandang menyeluruh (holistik) KAMMI terhadap dirinya sendiri dan cara mendefinisikan perannya di dalam realitas kebangsaan dan peradaban. Paradigma Gerakan KAMMI membentuk konstruksi gerakan dan menderivasikannya dalam program dan agenda gerakan.
9. Unsur-unsur perjuangan adalah elemen-elemen yang menjadi pilar sistem strategi dakwah (*siyasatud dakwah*) KAMMI dalam interaksinya dengan masyarakatnya untuk menjamin keberlangsungan gerakan.
10. Posisi KAMMI adalah pernyataan posisi, sikap, dan hubungan KAMMI dengan berbagai pihak terkait dalam mewujudkan Visi KAMMI.
11. Haluan organisasi KAMMI adalah haluan yang memandu arah, pokok, dan prioritas agenda gerakan sesuai dengan analisa kondisi yang dihadapi berdasarkan filosofik gerakan.

BAB II

Filosofi Gerakan

Pasal 2

Visi KAMMI

KAMMI adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan pemimpin masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia.

Pasal 3

Misi KAMMI

- a. Membina keislaman, keimanan, dan ketaqwaan mahasiswa muslim Indonesia.
- b. Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, dan politik mahasiswa.
- c. Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang *rabbani*, madani, adil, dan sejahtera.
- d. Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kerakyatan dan kebangsaan.
- e. Mengembangkan kerjasama antar elemen masyarakat dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Pasal 4

Kredo Gerakan

- a. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan *taklid*, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan.

- b. Kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggentarkan hati kami, atau membuat kami tertunduk apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti, kecuali ketakutan kepada selain-Nya.
- c. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama *al-haq* kami bertempur, sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam.
- d. Kami adalah penghitung risiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil risiko. *Syahid* adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah para perindu surga. Kami akan menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, dzikir, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung dakwah, akan beredar bersama dakwah ini ke mana pun perginya, menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi penyebarannya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh.
- e. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di dalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang progressif yang bebas dari kejumudan, karena kami memandang bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam.
- f. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan musuh dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat, seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kepehaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya dan responsif terhadap masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, semangat yang berkobar tinggi.

Pasal 5
Prinsip Gerakan KAMMI

- a. Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI
- b. Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI
- c. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI
- d. Perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI
- e. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI
- f. Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI

Pasal 6
Karakter Organisasi KAMMI

KAMMI adalah organisasi kader (*harokatut tajnid*) dan organisasi pergerakan (*harokatul ama*).

Pasal 7
Paradigma Gerakan KAMMI

1. KAMMI adalah Gerakan Da'wah Tauhid
 - a. Gerakan Da'wah Tauhid adalah gerakan pembebasan manusia dari berbagai bentuk penghambaan terhadap materi, nalar, sesama manusia dan lainnya, serta mengembalikan pada tempat yang sesungguhnya: Allah swt.
 - b. Gerakan Da'wah Tauhid merupakan gerakan yang menyerukan deklarasi tata peradaban kemanusiaan yang berdasar pada nilai-nilai universal wahyu ketuhanan (*Ilahiyah*) yang mewujudkan Islam sebagai rahmat semesta (*rahmatan lil 'alamin*).
 - c. Gerakan Da'wah Tauhid adalah gerakan perjuangan berkelanjutan untuk menegakkan nilai kebaikan universal dan meruntuhkan tirani kemungkarannya (*amar ma'rub nabi munkar*)
2. KAMMI adalah Gerakan Intelektual Profetik
 - a. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang meletakkan keimanan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal
 - b. Gerakan Intelektual Profetik merupakan gerakan yang mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal
 - c. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang mempertemukan nalar akal dan nalar wahyu pada usaha perjuangan perlawanan, pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara organik.
3. KAMMI adalah Gerakan Sosial Independen
 - a. Gerakan Sosial Independen adalah gerakan kritis yang menyerang sistem peradaban materialistik dan menyerukan peradaban manusia berbasis tauhid.
 - b. Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan kultural yang berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan yang berakar pada nurani kerakyatan.
 - c. Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan pembebasan yang tidak memiliki ketergantungan pada hegemoni kekuasaan politik-ekonomi yang membatasi.
4. KAMMI adalah Gerakan Politik Ekstraparlementer

- a. Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan perjuangan melawan tirani dan menegakkan demokrasi yang egaliter.
- b. Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan sosial kultural dan struktural yang berorientasi pada penguatan rakyat secara sistematis dengan melakukan pemberdayaan institusi-institusi sosial/rakyat dalam mengontrol proses demokrasi formal.

Pasal 8
Unsur-unsur Perjuangan KAMMI

Agar dakwah dapat tumbuh berkelanjutan secara seimbang, tetap berada pada orientasi yang benar, mampu mengelola amanah dan masalah, dan terus memiliki kekuatan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, maka KAMMI menyusun dirinya di atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. *bina al-qa'idah al-ijtima'iyah* (membangun basis sosial), yaitu membangun lapisan masyarakat yang simpati dan mendukung perjuangan KAMMI yang meliputi masyarakat umum, mahasiswa, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, pers, tokoh, dan lain sebagainya.
2. *bina al-qa'idah al-barokiyah* (membangun basis operasional), yaitu membangun lapisan kader KAMMI yang bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk merealisasikan dan mengeksekusi tugas-tugas dakwah yang telah digariskan KAMMI.
3. *bina al-qa'idah al-fikriyah* (membangun basis konsep), yaitu membangun kader pemimpin yang mampu menjadi teladan masyarakat, memiliki kualifikasi keilmuan yang tinggi sesuai bidangnya, yang menjadi guru bagi gerakan, mengislamisasikan ilmu pengetahuan pada bidangnya, dan memelopori penerapan solusi Islam terhadap berbagai segi kehidupan manusia.
4. *bina al-qa'idah al-siyasiyah* (membangun basis kebijakan), yaitu membangun kader ideolog, pemimpin gerakan yang menentukan arah gerak dakwah KAMMI, berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Keempat unsur tersebut merupakan piramida yang seimbang, harmonis dan kokoh, yang menjamin keberlangsungan gerakan KAMMI.

BAB III
Posisi KAMMI

Pasal 9
KAMMI dan Gerakan Mahasiswa (Gerakan Kepemudaan)

KAMMI adalah gerakan mahasiswa sekaligus sebagai gerakan kepemudaan. Karena itu KAMMI meyakini bahwa KAMMI dan beragam gerakan mahasiswa dan gerakan kepemudaan di Indonesia adalah elemen bangsa yang akan menjadi pewaris sah dari masa depan bangsa ini. KAMMI adalah generasi muda yang menjadi sumberdaya bangsa masa depan (*iron stock*). Generasi muda adalah generasi yang bersifat idealis dengan cita-cita terhadap bangsanya. Generasi muda adalah generasi yang selalu kritis terhadap kondisi yang stagnan (*status quo*). Maka KAMMI bekerjasama dengan seluruh elemen gerakan mahasiswa dan gerakan kepemudaan dalam kesamaan prinsip komitmen kebangsaan yang tulus, bukan karena kepentingan politik pragmatis. KAMMI meyakini bahwa interaksi *mu'amalah* KAMMI dengan beragam gerakan pemuda dan mahasiswa adalah interaksi positif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan sebagai pembelajaran bagi masa depan saat KAMMI bersama-sama mewarisi bangsa ini.

Pasal 10
KAMMI dan Institusi Pendidikan Tinggi

KAMMI adalah gerakan mahasiswa yang tumbuh dari institusi pendidikan tinggi (kampus) yang mewarisi prinsip intelektualitas dan kebebasan akademik. KAMMI meyakini bahwa jiwa intelektual itu dinyatakan dalam intelektualisme yang bertanggung jawab, yang berbasis pada realitas masyarakat, dan yang organik. Sehingga, KAMMI meyakini bahwa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, adalah hak seluruh masyarakat, sehingga merupakan kewajiban negara untuk memberikan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau masyarakat. Institusi pendidikan tinggi, karena cakupanawasannya, adalah institusi yang paling bertanggung jawab dalam memberikan pencerahan dan meningkatkan kualitas rakyat Indonesia. Karena itu, institusi pendidikan tinggi harus bersifat kerakyatan yang peduli terhadap realitas masyarakat, bukan menghamba pada kekuasaan atau hegemoni global. Prinsip kebebasan akademik meletakkan institusi pendidikan tinggi pada posisi kritis dan independen. KAMMI dalam aktivitasnya di dalam dan dengan institusi pendidikan tinggi berusaha untuk menciptakan lingkungan akademik (*civitas academica*) yang egaliter, kritis, demokratis, dan independen.

Pasal 11
KAMMI dan Gerakan Islam

KAMMI memahami Islam sebagai prinsip-prinsip yang bersifat menyeluruh (*syaaamil*) yang meliputi seluruh dimensi manusia dan kehidupannya. KAMMI juga memahami Islam sebagai aturan hidup yang bersifat universal sebagai prinsip kesemestaan Islam (*rahmatan lil alamiin*). Karenanya Islam dapat hidup di dalam seluruh dimensi ruang di seluruh rentang zaman. Kami meyakini Islam sebagai sebuah kebenaran. Sehingga, KAMMI sebagai gerakan Islam, bersama-sama dengan seluruh gerakan Islam adalah gerakan yang akan mengenalkan dan membumikan prinsip kemenyeluruhan dan universalitas Islam dalam realitas kebangsaan dan peradaban. KAMMI akan bekerja sama dengan mereka dalam menyerukan kebaikan dan melawan

kemungkar (amar ma'ruf nahi munkar). KAMMI bersama seluruh gerakan (berasas) Islam adalah gerakan-gerakan penyeru kebaikan (*harokah da'wah*), yang menyerukan Islam dengan kedamaian dan kesungguhan (*mujahadah*).

Pasal 12
KAMMI dan Rakyat

KAMMI dan rakyat adalah ibarat antara ruh dan tubuh. KAMMI tumbuh dan berkembang di tengah-tengah rakyat. Sehingga, KAMMI akan senantiasa berdiri di bagian terdepan dalam membela kepentingan rakyat, menjadi solusi bagi persoalan mereka, menghubungkan kasih sayang yang damai di antara mereka, dan sekaligus berusaha keras untuk menjadi sebab bagi kemuliaan mereka. KAMMI meyakini bahwa merekalah tujuan dari adanya kontrak sosial kebangsaan, dan merekalah tujuan dari keberadaan *syari'ah* agama Islam (*adz dzaruriyatu al kbomsab*). Karena itu pengabaian terhadap eksistensi rakyat, apalagi tindakan pendzaliman terhadap mereka, adalah tindakan yang akan senantiasa KAMMI lawan.

Pasal 13
KAMMI dan Elemen Masyarakat

KAMMI adalah gerakan sosial yang bersama-sama dengan beragam elemen masyarakat dan gerakan sosial lain peduli terhadap realitas masyarakat Indonesia. Karena itu, sebisa mungkin, KAMMI akan senantiasa bekerja sama, ber-*mu'amalah*, dan saling memanfaatkan (*intifa'*) dengan seluruh elemen yang memiliki kepedulian yang sama dengan KAMMI. KAMMI melakukannya dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Pasal 14
KAMMI dan Partai Politik

KAMMI menyadari potensi politik KAMMI sebagai gerakan mahasiswa. Ekspresi gerakan KAMMI adalah ekspresi moral yang berdimensi politik, dan ekspresi politik yang berdasar pada prinsip moral dan intelektual. Sebagai gerakan politik yang berbasis moral, KAMMI tidaklah berpolitik pragmatis yang berorientasi kekuasaan baik bagi gerakan maupun kadernya. Tetapi, konsistensi KAMMI terhadap prinsip tersebut tidak akan menyebabkan KAMMI berjauhan dan antipati dengan Partai Politik yang bekerja dalam ranah politik praktis.

Pasal 15
KAMMI dan Pemerintahan

KAMMI meyakini prinsip kekuasaan sebagai *amanah* (tanggungjawab) dan *khadimab* (pelayanan) terhadap masyarakat. Maka kekuasaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak melayani adalah kezaliman, dan itu adalah musuh KAMMI. Oleh karena itu, KAMMI akan senantiasa memberikan kontrol dan evaluasi atas mereka yang padanya Allah limpahkan amanah memerintah bangsa ini. KAMMI akan mendukung (*tha'at*) setiap upaya perbaikan dan pembangunan yang dilakukan bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan nurani pada umumnya masyarakat, prinsip *syari'ah* Islam, dan logika intelektual. Tetapi KAMMI akan siap melawan pemerintahan yang dijalankan secara *dzalim*, tidak peka dengan realitas masyarakat, melanggar prinsip-prinsip *Ilahiyah*, dan tidak rasional. Keseluruhannya, akan KAMMI lakukan semaksimal mungkin tetapi senantiasa dengan menghindari cara-cara yang tidak bermoral, tidak berwawasan etis, dan membawa *madharat* lebih lanjut.

Pasal 16
KAMMI dan Media Massa

Kammi memahami peran strategis media massa sebagai salah satu pilar demokrasi. Media massa sekaligus menjadi instrumen penting dalam demokratisasi dalam arti pemberdayaan politik masyarakat dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang adil, efektif, dan efisien.

Media Massa yang cerdas turut mampu mewujudkan masyarakat yang peduli (*attentive mass*) terhadap fenomena sosial yang berkembang. Namun, penyimpangan fungsi media massa dapat mengakibatkan mereka bermertamofosa menjadi mesin-mesin kapitalis yang memperdagangkan berita-berita liputan yang menyimpang dari kode etik jurnalistik. Mereka dapat pula membodohi masyarakat dan menghancurkan bangunan moral dan sosial Indonesia.

Terhadap media massa yang konstruktif, kammi akan memerankan diri sebagai partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan terhadap media yang destruktif, kammi akan menjalankan komunikasi yang efektif guna merubah orientasi dan dampak negatif peran mereka.

BAB IV
Haluan Organisasi

Pasal 17
Visi Kebangsaan KAMMI

- a. Indonesia yang demokratis ditandai dengan tumbuhnya tradisi demokrasi, koridor demokrasi, akuntabilitas, transparansi kebijakan, partisipasi publik, dan dominasi politik yang mendukung perbaikan dan membunikan nilai-nilai Islam.

- b. Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi dan keadilan hukum, ditandai dengan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi dan penyakit-penyakit masyarakat.
- c. Indonesia yang berkomitmen dengan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sistem ekonomi berkeadilan dan ekonomi berdasarkan prinsip Islam yang mandiri yang mampu melawan hegemoni ekonomi pasar dan kapitalisme global.
- d. Indonesia yang membumikan nilai dan prinsip Islam secara obyektif dalam beragam ruang publik pada seluruh aspeknya.
- e. Indonesia yang rakyatnya memiliki komitmen kebangsaan dan solidaritas bersama yang tinggi yang mampu mengatasi beragam masalah dan konflik kemasyarakatan secara mandiri.
- f. Indonesia yang memiliki kemandirian politik internasional dan membangun solidaritas bersama dengan bangsa-bangsa miskin serta bangsa-bangsa terjajah.
- g. Indonesia yang senantiasa menghargai dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi khususnya teknologi yang murah terjangkau masyarakat, memiliki dampak samping rendah, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
- h. Indonesia yang memberikan prioritas utama pada pembangunan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat, pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kompetensi peserta didik bukan semata memenuhi pasar, serta pendidikan yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- i. Indonesia yang menghargai dan memajukan seni budaya lokal yang dibangun atas prinsip keunikan yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat kemanusiaan, bukan seni budaya pasar atau yang berprinsip semata seni untuk seni (*l'art for l'art*).
- j. Indonesia yang menjamin keamanan dan ketenangan warga negaranya dari segala bentuk hegemoni bangsa asing dan tindakan militeristiknya.

Pasal 18
Analisa Kondisi Kebangsaan

1. Potensi positif
 - a. Momentum reformasi yang berdampak pada terciptanya kondisi keterbukaan dan kebebasan bagi masyarakat dalam menyalurkan ekspresi politiknya
 - b. Tumbuhnya proses demokrasi di Indonesia melalui usaha-usaha reformasi konstitusi, pemilihan umum langsung, dan pertimbangan politik.
 - c. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung kecepatan arus informasi dan komunikasi.
 - d. Munculnya kebangkitan kesadaran umat dalam melakukan pembelaan atas hak-hak politik dan hak-hak sipil mereka.
2. Potensi negatif
 - a. Munculnya efek samping reformasi berupa liberalisme dan konflik horisontal, dan munculnya penunggang gelap reformasi yang bersifat hipokrit (munafik).
 - b. Konstelasi politik global yang memunculkan stigmatisasi negatif terhadap gerakan Islam melalui isu terorisme yang dapat menghambat proses perkembangan dakwah Islam.
 - c. Menguatnya ancaman neoliberalisme dan cengkeraman lembaga ekonomi kapitalis yang mengancam kemandirian dan stabilitas perekonomian bangsa Indonesia.
 - d. Ancaman gagalnya transisi demokrasi yang membeku akibat lemahnya usaha pembangunan kesadaran politik masyarakat oleh instrumen politik.
 - e. Tidak tuntasnya penyelesaian kasus KKN dan pelanggaran HAM Orde Baru, yang justru semakin kompleks dengan munculnya kasus yang sama di orde reformasi.
 - f. Otonomi daerah yang belum berhasil mensejahterakan masyarakat daerah tetapi justru memunculkan koruptor baru baik dari legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.
 - g. Rendahnya perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan kesehatan yang terjangkau masyarakat, dan kecenderungan negara untuk mengomersialisasikan urusan pendidikan, kesehatan, dan hajat hidup masyarakat banyak.
 - h. Lemahnya daya tawar dan kemampuan diplomasi bangsa Indonesia di dunia internasional.
 - i. Belum masifnya internalisasi nilai-nilai Islam sebagai prinsip obyektif masyarakat Indonesia
 - j. Reformasi birokrasi yang belum tuntas
 - k. melemahnya gerakan oposisi mahasiswa.
 - l. kurang optimalnya pemerintah dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan perehabilitasian bencana dan konflik sosial baik di indonesia maupun internasional.

Pasal 19
Tujuan Jangka Panjang KAMMI (2004-2014)

- a. KAMMI mampu meletakkan seluruh aktifitasnya dalam kerangka filosofi gerakan secara konsisten
- b. KAMMI memiliki sistem kaderisasi yang kuat, handal, berkelanjutan (*sustainable*) yang terinternalisasi secara utuh dan khas (*otentik*) dalam diri setiap kader
- c. Kader KAMMI memiliki pemahaman akan nilai-nilai Islam yang terinternalisasi dalam aktifitasnya sehari-hari, tradisi politik dan intelektual, serta komitmen ke-KAMMI-an yang tinggi
- d. KAMMI memiliki mekanisme keorganisasian yang lengkap, tradisi organisasi yang disiplin dan islami, serta mampu mendistribusikan fungsi strukturalnya dengan rapi

- e. KAMMI memiliki struktur organisasi yang lengkap tanpa terjebak pada aturan yang birokratis yang mampu mengakomodasi potensi dan kecenderungan kader
- f. KAMMI diperhitungkan secara institusional serta memiliki daya tawar sebagai salah satu kekuatan politik alternatif di Indonesia
- g. KAMMI mampu memberikan sikap politik yang cerdas dan solutif yang berbasis pada pemahaman substansi prinsip-prinsip Islam, pemahaman realitas politik, dan kemampuan intelektual kader-kadernya
- h. KAMMI mampu berkembang dan dapat menjangkau 35 % institusi pendidikan tinggi di Indonesia
- i. KAMMI mampu menjadi elemen masyarakat yang diterima oleh banyak pihak, serta menjadi pelopor dan perekat antara elemen gerakan masyarakat khususnya gerakan Islam
- j. KAMMI mampu berinteraksi dan membangun jaringan dengan gerakan mahasiswa Islam internasional untuk mendorong tumbuhnya kekuatan muda alternatif berskala global
- k. KAMMI menjadi elemen dakwah yang penting dan memberikan kontribusi yang besar pada dakwah Islam meliputi:
 - Kontribusi kuantitas kader yang meningkatkan jumlah kader (*da'i*) gerakan dakwah Islam
 - Kontribusi kualitas kader, melalui kemampuan meningkatkan kualitas kader gerakan dakwah dengan kekhasan kaderisasi *siyasi* KAMMI, dan mampu menjadi wahana transformasi kader gerakan dakwah dari kader mahasiswa (*thulabiyah*) menjadi kader masyarakat (*syabiyah*), profesional (*mihaniyah*), dan politik (*siyasiyah*)
 - Kontribusi agenda dakwah, melalui dukungan terhadap agenda-agenda strategis gerakan dakwah dalam bingkai logika dan prinsip gerakan KAMMI

Pasal 20
Analisa Kondisi KAMMI

1. Potensi positif

- a. Momentum reformasi yang mengantarkan citra KAMMI sebagai gerakan mahasiswa muda Islam yang bersih, solid, dan militan
- b. Munculnya KAMMI sebagai gerakan mahasiswa yang secara kuantitatif besar dan menarik dibandingkan gerakan mahasiswa lain
- c. Banyaknya jumlah kader dan beragamnya potensi yang dimiliki kader
- d. Moralitas gerakan yang relatif masih terjaga dan komitmen terhadap perjuangan Islam yang kuat.

2. Potensi negatif

- a. KAMMI belum dikelola secara modern sebagai sebuah organisasi besar yang memimpin (*leading*) dan visioner
- b. KAMMI belum membangun fundamen gerakan yang kuat yang mampu terwariskan sebagai sebuah otentisitas ideologi.
- c. Manajemen pengelolaan kader yang tidak adaptif dan optimal yang mampu memunculkan kader dengan pemahaman visi, misi, dan filosofi gerakan yang kuat.
- d. Konsolidasi struktur gerakan yang masih lemah, dan tradisi komunikasi struktur yang tidak kritis dan terbuka
- e. Dukungan sumber dana dan sumber daya manusia pendukung yang belum memadai
- f. Kurang mampu mengoptimalkan secara cerdas jaringan gerakan yang telah terbangun
- g. Tidak memiliki kekuatan jaringan yang memadai.
- h. Belum terbangun tradisi ilmiah yang baik
- i. Belum mampu mentransformasikan gagasan besar KAMMI terhadap permasalahan umat dan bangsa secara konseptual

Pasal 20
Rencana Strategis Pencapaian Tujuan Jangka Panjang

Tahap I 2004 – 2006

1. Pembangunan infrastruktur gerakan, dasar-dasar filosofi gerakan, dan sistem manajemen organisasi
2. Menumbuhkan dan mengembangkan jaringan gerakan mahasiswa internasional
3. Penyempurnaan pola umum kaderisasi menuju kaderisasi yang mengadaptasi perubahan zaman dan filosofi gerakan KAMMI.
4. Mempertahankan ekspansi kader melalui implementasi kontinyu pola umum kaderisasi dan penguatan konsep kader *siyasi*.
5. Pemantapan posisi sebagai gerakan dakwah tauhid melalui konsistensi tindakan amal dakwah KAMMI, dan pemantapan jaringan dengan gerakan Islam.
6. Pembangunan posisi sebagai gerakan intelektual profetik, dengan membangun tradisi berpolitik KAMMI pada prinsip politik moral berbasis nalar intelektual.
7. Ekspansi gerakan melalui pendirian KAMMI Komisariat dan KAMMI Daerah baru.
8. Penguatan peran lokal KAMMI Daerah.

Tahap II 2006 – 2008

1. Usaha pewarisan dasar-dasar filosofi gerakan secara konsisten dan menyeluruh kepada seluruh tingkat struktur dan kader.

2. Menguatkan infrastruktur gerakan dan implementasi sistem manajemen organisasi yang mengarahkan organisasi menjadi efektif dan efisien.
3. Implementasi pola umum kaderisasi yang diperbarui dalam beragam perangkat dan mekanisme kaderisasi dengan fokus pada pembentukan kader intelektual profetik.
4. Penjagaan posisi sebagai gerakan dakwah tauhid yang secara proaktif menjaga dan memperkuat konsolidasi gerakan Islam.
5. Pemertahanan posisi sebagai gerakan intelektual profetik dengan menjaga konsistensi berpolitik moral berbasis intelektual pada tingkat daerah dan pusat.
6. Penguatan posisi sebagai gerakan intelektual profetik melalui pembangunan jaringan intelektual dengan kampus, lembaga kajian, organisasi profesi, ikatan cendekiawan dlsb
7. Mengkonsolidasikan hasil ekspansi organisasi berdasar mekanisme manajemen organisasi.
8. Mempertahankan usaha penguatan peran lokal KAMMI Daerah

Tahap III 2008 – 2010

1. Pentradisian usaha pewarisan dasar-dasar filosofi gerakan secara konsisten dan menyeluruh kepada seluruh tingkat struktur dan kader.
2. Menjaga infrastruktur gerakan dan implementasi sistem manajemen organisasi yang mengarahkan organisasi menjadi efektif dan efisien.
3. Mempertahankan implementasi pola umum kaderisasi yang diperbarui dalam beragam perangkat dan mekanisme kaderisasi dengan fokus pada pembentukan kader intelektual profetik
4. Pentradisian dan penyeimbangan pola sebagai gerakan dakwah tauhid dan gerakan intelektual profetik.
5. Pembangunan posisi sebagai gerakan socialindependen dengan mulai terlibat dalam beragam aksi tindakan sosial kultural yang terencana dalam beragam aspeknya.
6. Ekspansi gerakan melalui pendirian KAMMI Komisariat dan KAMMI Daerah baru.
7. Mempertahankan posisi peran lokal KAMMI Daerah
8. Peningkatan kompetensi manajemen keorganisasian KAMMI Komisariat

Tahap IV 2010 – 2012

1. Pentradisian usaha pewarisan dasar-dasar filosofi gerakan secara konsisten dan menyeluruh kepada seluruh tingkat struktur dan kader.
2. Menjaga infrastruktur gerakan dan implementasi sistem manajemen organisasi yang mengarahkan organisasi menjadi efektif dan efisien.
3. Mengevaluasi ulang pola umum kaderisasi dan perumusah usaha pembaruan lebih lanjut
4. Pentradisian dan penyeimbangan pola sebagai gerakan dakwah tauhid dan gerakan intelektual profetik.
5. Penguatan posisi gerakan sosial independen dengan membangun jaringan gerakan sosial dan gerakan kultural
6. Mengkonsolidasikan hasil ekspansi organisasi berdasar mekanisme manajemen organisasi.
7. Penjagaan kualitas manajemen keorganisasian KAMMI Komisariat dan pembangunan peran lokal KAMMI Komisariat

Tahap V 2012 – 2014

1. Pentradisian usaha pewarisan dasar-dasar filosofi gerakan secara konsisten dan menyeluruh kepada seluruh tingkat struktur dan kader.
2. Menjaga infrastruktur gerakan dan implementasi sistem manajemen organisasi yang mengarahkan organisasi menjadi efektif dan efisien.
3. Menurunkan pola umum kaderisasi hasil pembaruan lebih lanjut dalam implementasi pada beragam perangkat dan mekanisme kaderisasi dengan fokus pada pembentukan kader sosial.
4. Pentradisian dan penyeimbangan pola sebagai gerakan dakwah tauhid dan gerakan intelektual profetik, serta gerakan sosial independen.
5. Menguatkan posisi gerakan sosial independen dengan membangun jaringan gerakan sosial dengan skala global
6. Membangun jaringan gerakan global sebagai sebagai pemberi tawaran alternatif pada peradaban global
7. Membangun tradisi gerakan ekstra parlementer yang solid yang berbasis kultur gerakan sosial dan gerakan intelektual.
8. Penguatan kemandirian KAMMI Komisariat dan otonomisasi KAMMI Komisariat

Pasal 21 Agenda Jangka Pendek 2004-2006

A. Organisasi

1. Menyelesaikan dasar filosofi gerakan seperti verbalisasi ideologi KAMMI dalam sebuah Manhaj Perjuangan Gerakan
2. Seluruh struktur KAMMI memiliki cetak biru (*blue print*) organisasi setidaknya sampai 2 periode ke depan dalam GBHO masing-masing.
3. Memulai implemmentasi distribusi fungsi struktural dengan rapi.
4. Memiliki mekanisme penelitian, pengembangan, dan evaluasi organisasi KAMMI Pusat, KAMMI Daerah dan KAMMI Komisariat.
5. Pembentukan struktur organisasi yang mengimplementasikan penguatan ke arah gerakan intelektual profetik.

6. Memulai akomodasi terhadap spesialisasi kader dalam struktur organisasi atau pembentukan ruang-ruang spesialisasi (BK dan LSO) bagi kader khususnya spesialisasi keilmuan sebagai basis konstruksi sebagai gerakan intelektual profetik.
7. Ekspansi organisasi dengan pembentukan minimal 5 KAMMI Daerah baru

C. Kaderisasi

1. Menyempurnakan konsep pola kaderisasi sebagai adaptasi terhadap perkembangan kondisi dan tuntutan penguatan ke arah gerakan intelektual
2. Menyelesaikan rancangan perangkat implementasi kaderisasi yang efektif dan efisien
3. KAMMI memiliki sistem basis data kaderisasi yang seragam secara nasional
4. Pencapaian target penambahan kader hingga yang ditetapkan oleh setiap struktur KAMMI
5. Pencapaian target rasio jenjang kader KAMMI Daerah secara piramida dengan rincian AB1 60 %, AB2 30 %, dan AB3 10 %
6. Pencapaian target kualitas kader dengan indikator 60 % dari semua anggota tersertifikasi
7. Meningkatkan skill kepemimpinan dan wawasan politik pengurus KAMMI Pusat, KAMMI Daerah dan KAMMI Komisariat
8. Membangun tradisi intelektual dengan menumbuhkan tradisi membaca, menulis, dan diskusi di kalangan kader.

D. Jaringan Gerakan

1. Terlibat aktif dalam aliansi jaringan gerakan Islam yang bersifat permanen baik di tingkat Internasional, nasional, daerah, maupun kampus
2. Terlibat aktif dalam interaksi antar gerakan mahasiswa
3. Membangun jaringan politik (tokoh, LSM, dan partai politik) di tiap daerah
4. Membangun jaringan donasi (LSM maupun individu)
5. Mempertahankan citra KAMMI sebagai gerakan mahasiswa Islam yang terbuka dan moderat.

E. Sosial Politik

1. KAMMI Daerah pro aktif dalam menyikapi isu sosial politik lokal di masing-masing daerah, sebagai adaptasi terhadap konsep otonomi daerah
2. Membangun tradisi penyikapan realitas sosial politik yang sedang berkembang dengan cerdas, intelektual, progressif, Islami
3. Membangun basis gerakan di masyarakat.

F. Administrasi dan Keuangan

1. KAMMI Pusat dan KAMMI Daerah memiliki sekretariat beserta kelengkapan organisasi standar
2. KAMMI Pusat dan KAMMI Daerah memiliki tata tertib administrasi organisasi
3. KAMMI Pusat dan KAMMI Daerah memiliki mekanisme laporan keuangan yang tertib
4. KAMMI Pusat dan KAMMI Daerah menyetatkan *cashflow* organisasi
5. Seluruh struktur KAMMI menyetatkan uang pangkal dan iuran rutin kader dengan mekanisme yang telah dibuat
6. Membangun kemandirian finansial KAMMI

Pasal 22 Parameter Keberhasilan

Kepengurusan KAMMI pusat dinyatakan berhasil jika agenda jangka pendek pada masing-masing aspek dapat terlaksana minimal 70 %

BAB V **Khatimah**

Pasal 23

Terus bergerak untuk menyadarkan umat dan senantiasa menciptakan perbaikan dengan seluruh makna yang terkandung di dalamnya, adalah jati diri KAMMI yang sesungguhnya. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa dibuktikan oleh perjuangan yang tidak berhenti untuk merealisasikannya. KAMMI adalah ruh baru di tubuh umat yang dilahirkan sebagai fajar kebangkitan umat. KAMMI seharusnya merupakan “anugerah Allah bagi Indonesia”. Dan hanya kepada Allah semata kami berserah diri dan memohon pertolongan-Nya. *Faidza 'azqata fatawakkal 'alallah.*

CURICULLUM VITAE

Nama : Hima Kurnia
TTL : Gresik, 29 Oktober 1985
Alamat Asal : Watu Gajah, Rt 09 Rw 03 Kramat Kec. Bungah, Kab. Gresik,
Jawa Timur
Alamat Jogja : "Wisma Indonesia", Sapen GK 1/401 Yogyakarta
No Hp : 081 227 278 300
Nama Ayah : Moh. Thohir
Nama Ibu : Shofiyah
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

SD : SDN Kramat, Lulus Tahun 1997
SMP : MTs Assa'adah II, Lulus Tahun 2000
SMA : SMU Assa'adah, Lulus Tahun 2003
PT : Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, terdaftar Tahun 2004- sekarang

Pengalaman Organisasi:

- ❖ Bendahara II UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Tahun 2005/2006
- ❖ Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (PTKM) HMI Komfak Ushuluddin Tahun 2006/2007
- ❖ Wakil Sekretaris Umum Bidang Internal HMI Korkom UIN Tahun 2007/2008
- ❖ Ketua Bidang Eksternal KOHATI (Korp HMI-Wati) HMI Cabang Yogyakarta Tahun 2007/2008
- ❖ Koord. Jurusan Sosiologi Agama BEM-J PA&SA Tahun 2007
- ❖ Sekretaris Umum BEM-PS Sosiologi Agama 2007-sekarang